

**EVALUASI EFEKTIVITAS DAN SINKRONISASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN SERTA STRATEGI MEMAJUKAN
KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH**

Tim Evaluasi

1. Prof.Dr. Andreas Lako (Ketua)
2. Dr. A. Ika Rahutami, M.Si
3. Dr. Agnes A. Christmastuti, M.Si, Akt
4. MG Westri Kekalih, SE, M.Si
5. Rudy Eliyadi, SE, M.Si
6. Arief Wahyudi, S.Sos, M.Si

**Hasil Kerjasama Antara
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
dengan LPPM Unika Soegijapranata
2015**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Executive Summary

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pelaksanaan
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Output Yang Diharapkan
- 1.5. Outcome Yang Diharapkan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 2.1. Peran UMKM
- 2.2. Model Pengembangan UMKM
- 2.3. Kebijakan Pengembangan UMKM

BAB III. METODE EVALUASI

- 3.1. Jenis Data
- 3.2. Lokasi Penelitian
- 3.3. Populasi dan Sampel
- 3.4. Metode Pengumpulan Data
- 3.5. Teknik Analisis Data

BAB IV. KONDISI PEREKONOMIAN DAN KUMKM PROVINSI JAWA TENGAH

- 4.1. Tinjauan Kinerja Perekonomian Jawa Tengah
- 4.2. Kinerja Koperasi Jawa Tengah
- 4.3. Tinjauan Kinerja UMKM Jawa Tengah

BAB V. EVALUASI RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

- 5.1. Telaah Kebijakan Koperasi dan UMKM
- 5.2. Telaah Empiris
- 5.3. Evaluasi Kebijakan
- 5.4. Evaluasi Anggaran: Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis
- 5.5. Analisis SWOT Koperasi dan UMKM
 - 5.5.1. Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UMKM
 - 5.5.2. Analisis SWOT Pelaku KUMKM

BAB VI. DISKUSI HASIL DAN KESIMPULAN

- 6.1. Diskusi Hasil
- 6.2. Kesimpulan

BAB VII. TANTANGAN DAN STRATEGI MEMAJUKAN KOPERASI DAN UMKM JAWA TENGAH

- 7.1. Tantangan Operasional dan Rekomendasi Kebijakan
- 7.2. Tantangan Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

REFERENSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunanNya penyusunan laporan **“EVALUASI EFEKTIVITAS DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SERTA STRATEGI MEMAJUKAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH”** ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah dengan LPPM Unika Soegijapranata dalam upaya mengevaluasi efektivitas dan sinkronisasi program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selama 2010-2014.

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan program-program berberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM) serta permasalahan internal-eksternal yang melingkupinya, Tim menelusuri semua data sekunder dan data primer yang relevan dengan kinerja Dinas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM sudah sangat bagus. Namun dalam hal sinkronisasi program pemberdayaan dengan instansi-intansi terkait, kinerja Dinas dinilai belum optimal. Para pelaku KUMKM juga menilai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi belum berperan optimal dalam menumbuhkembangkan KUMKM di Jateng. Belum optimalnya peran dan kontribusi tersebut disebabkan oleh sejumlah permasalahan internal dan eksternal yang kompleks. Karena itu, Tim merekomendasikan sejumlah kebijakan operasional, taktikal dan strategis yang perlukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Gubernur Jawa Tengah untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut sehingga pembangunan sektor KUMKM ke depan dapat semakin maju.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ini adalah berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah serta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan dan membantu kami dalam menyelesaikan evaluasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan para pelaku KUMKM yang telah mengisi kuisisioner dan berperan aktif dalam FGD sehingga memungkinkan kami mendapatkan banyak informasi tentang SWOT KUMKM di Jawa Tengah. Kepada pimpinan Bank Jateng, Bank Indonesia dan pimpinan dari dinas-dinas terkait yang telah memberikan masukan-masukan penting tentang UMKM di Jateng, kami juga haturkan terima kasih.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan untuk memajukan KUMKM Jawa Tengah di waktu-waktu yang akan datang.

Semarang, 31 Maret 2015

Tim penyusun

EXECUTIVE SUMMARY

Pada tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia, termasuk yang ada di Jawa Tengah, akan menghadapi era pasar bebas ASEAN dimana produk-produk dan jasa dari negara-negara ASEAN bisa leluasa masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengarahkan, mendorong, membantu dan memberdayakan segenap pelaku usaha dalam menghadapi persaingan regional tersebut. Ketidaksiapan pemerintah dan pelaku UMKM dalam menghadapi era tersebut dapat menyebabkan sejumlah permasalahan sosial dan ekonomi yang serius bagi para pelaku UMKM, pemerintah, perekonomian daerah dan masyarakat luas.

Sebagai instansi yang disertai tugas untuk menata, mengelola, mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, pertanyaan krusial yang patut diajukan adalah apakah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan tatakelola organisasi dan merumuskan program-program pemberdayaan KUMKM serta melaksanakannya secara konsisten untuk memperkuat KUMKM Jawa Tengah dan mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi era pasar bebas tersebut? Jika sudah mempersiapkan dan melaksanakannya, bagaimana efisiensi dan efektivitas hasilnya serta implikasinya bagi perekonomian Jawa Tengah dan pertumbuhan serta produktivitas KUMKM? Bagaimana tanggapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), khusus para kepala dinas KUMKM kabupaten/kota, instansi terkait dan pelaku KUMKM, terhadap kinerja program-program pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah? Apa saja permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi Dinas KUMKM Jawa Tengah?

Evaluasi ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut. Secara khusus, evaluasi ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM pada Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah dan dampak pemberdayaan KUMKM terhadap produktivitas KUMKM, kesejahteraan masyarakat KUMKM, dan pertumbuhan

KUMKM di Jawa Tengah. Evaluasi ini juga menganalisis sinkronisasi antara program pemberdayaan KUMKM pada tingkat Dinas KUMKM provinsi dengan program pemberdayaan KUMKM pada tingkat kabupaten/kota serta menganalisis permasalahan internal dan eksternal KUMKM Jawa Tengah guna optimalisasi program pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil telaah dan evaluasi yang mendalam terhadap data sekunder dan data primer yang diperoleh, secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas pokoknya dengan baik dalam mendampingi, memberdayakan dan mengembangkan KUMKM di Jawa Tengah. Namun, dalam hal mempersiapkan para pelaku UMKM menghadapi era pasar bebas MEA dan efektivitas pendampingannya, Dinas dinilai masih kurang atau belum optimal.

Secara khusus, hasil analisis menyimpulkan sejumlah temuan menarik sebagai berikut. **Pertama**, pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM oleh Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010-2014 telah mencapai hasil-hasil yang efisien dan efektif. Hampir semua program kerja yang telah direncanakan telah dilaksanakan secara baik dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang amat baik karena melampaui target-target kinerja yang telah ditetapkan. Karena itu, dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM selama 2010-2014, kinerja Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai **SANGAT BAIK (A+)**.

Kedua, selain mencapai hasil yang efisien dan efektif, pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM oleh Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah selama 2010-2014 juga telah memberikan dampak positif yang luas terhadap produktivitas dan pertumbuhan KUMKM, dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat pelaku KUMKM. Berdasarkan hasil analisis terhadap data ekonomi selama 2010-2014 terlihat bahwa jumlah KUMKM dan produktivitasnya dalam aset, omzet dan modal serta produksi/jasa yang dihasilkannya terus meningkat. Peningkatan kinerja tersebut berdampak positif pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan para pelaku KUMKM.

Ketiga, meskipun mencapai hasil yang efisien dan efektif serta memberikan dampak positif yang luas bagi pertumbuhan dan produktivitas KUMKM serta kesejahteraan bagi pelaku KUMKM, namun ternyata ada sejumlah permasalahan internal dan eksternal yang perlu segera dicermati dan ditanggapi secara arif dan bijaksana serta ditindaklanjuti oleh pimpinan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah maupun pihak-pihak terkait ke depan. Selain itu, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program pengembangan, pendampingan dan pemberdayaan KUMKM pada tingkat Dinas KUMKM provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota juga belum berjalan secara optimal. Paling sedikit, ada 10 permasalahan yang menjadi tantangan serius bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan peran strategis Dinas dalam upaya pendampingan dan pemberdayaan KUMKM serta memajukan pembangunan sektor KUMKM dan peran strategisnya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah perlu segera mengambil langkah-langkah proaktif yang strategis dan operasional dengan merumuskan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi dan program kerja yang tepat guna serta melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meminimalisir permasalahan internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dalam laporan ini. Selain itu, Dinas juga perlu melakukan sinkronisasi program kegiatan pemberdayaan KUMKM pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan pihak-pihak *stakeholder* terkait. Kemitraan strategis dengan semua *stakeholder* di Jawa Tengah, termasuk dengan perguruan tinggi, dalam upaya menumbuhkembangkan, memberdayakan dan mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga perlu dilakukan secara masif dan intensif serta berkesinambungan.

Keempat, meskipun secara politik KUMKM telah dijadikan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan perekonomian daerah, namun laju pembangunan dan pertumbuhan sektor ini dinilai berjalan lamban. Kontribusi sektor KUMKM dalam pengurangan terhadap kemiskinan dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi daerah juga dinilai tidak signifikan. Dari hasil analisis terlihat

bahwa permasalahan tersebut disebabkan masih terbatasnya jumlah UMKM yang didampingi dan diberdayakan pemerintah, kurang maksimal dan efektifnya program-program pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, minimnya bantuan permodalan usaha dan manajerial dari pemerintah, lemahnya akses permodalan usaha pelaku UMKM kepada perbankan akibat bunga dan jaminan yang tinggi, serta lemahnya kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar instansi-instansi pemerintah dengan pihak swasta dan pelaku UMKM dalam upaya pembangunan KUMKM.

Salah satu penyebab utama munculnya sejumlah permasalahan tersebut adalah semakin terbatasnya alokasi anggaran dari APBD untuk pembangunan sektor KUMKM dan kurangnya sinergisitas antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan pihak-pihak swasta. Untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang bersifat strategis tersebut maka ke depan Gubernur Jawa Tengah dan SKPD-SKPD terkait perlu menaikan alokasi anggaran dari APBD untuk pembangunan sektor KUMKM dan memperkuat sistem dan tatakelola KUMKM antara propinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, juga perlu memperkuat kerjasama dan sinergisitas antara pemerintah, pelaku bisnis, perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya memperluas kapasitas pembangunan KUMKM. Gubernur atau pemerintahan Provinsi Jawa Tengah juga perlu membuat kebijakan-kebijakan daerah yang pro dan ramah KUMKM. Dengan melakukan hal-hal tersebut maka peran dan kontribusi nyata dari sektor KUMKM dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta meningkatkan perekonomian daerah akan meningkat pesat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun regional dimana Indonesia mulai terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengarahkan, mendorong, membantu dan memberdayakan segenap pelaku usaha dalam menghadapi persaingan regional tersebut. Hal ini penting karena produk-produk dan jasa dari sejumlah negara ASEAN kemungkinan akan membanjiri pasar Indonesia, termasuk pasar di Jawa Tengah. Ketidaksiapan pemerintah dan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam menghadapi era tersebut dapat menyebabkan mereka kalah bersaing dan tersingkir.

Jauh sebelum integrasi MEA, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengantisipasinya dengan memberikan komitmen politik berupa memberi prioritas pembangunan daerah pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Wujud dari komitmen tersebut adalah dicanangkannya pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 serta RPJMD Jawa Tengah Tahun 2014-2018. Komitmen tersebut lalu diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dilaksanakan dan direalisasikan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik pada level provinsi maupun kabupaten dan kota.

Berkenaan dengan komitmen terhadap pembangunan koperasi dan UMKM tersebut, Visi pembangunan Jawa Tengah dalam RPJMD 2008-2013 menyatakan “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG SEMAKIN SEJAHTERA”, sementara Misi ke-2 RPJMD menyatakan “Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya”. Dari Visi dan Misi tersebut tersirat jelas bahwa tujuan dari

pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Juga untuk membangun kesiapan para pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan dengan produk-produk negara lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam era globalisasi.

Dalam upaya mewujudkan komitmen dan Visi serta Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut, khususnya yang berhubungan dengan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Jateng telah mengambil langkah-langkah penting untuk membangun, mendampingi, memberdayakan dan memajukan koperasi dan UMKM.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, lalu dilanjutkan dengan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dalam Renstra tersebut diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan, dan juga Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif, dan Indikator Kinerja. Dalam Renstra-SKPD 2008-2013 dinyatakan bahwa Visi dari SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah adalah mewujudkan "*Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Yang Mandiri, Tangguh, Berdaya Saing, Berperan Utama Dalam Perekonomian Rakyat Jawa Tengah*".

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ada lima tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kemandirian KUMKM; (2) meningkatnya proporsi usaha kecil formal; (3) meningkatnya potensi produk koperasi dan UMKM yang berorientasi ekspor; (4) bertumbuhnya wirausaha baru dan kesempatan kerja; dan (5) meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi dan KUMKM. Prioritas sasaran, program kerja dan kegiatan KUMKM setiap tahun diarahkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Langkah kedua adalah menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD untuk merealisasikan target-target dan program kerja yang direncanakan dalam Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam Rencana Kerja Tahunan ini, Dinas Koperasi dan UMKM Jateng menetapkan prioritas-prioritas sasaran yang ingin dicapai dan merumuskan program-program kerja serta kegiatan-kegiatan dan anggarannya.

Langkah ketiga adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. Dalam LAKIP ini, Dinas Koperasi dan UMKM memaparkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan dan perwujudan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Target, Program dan kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Koperasi dan UMKM selama setahun, kemudian disertai juga laporan tingkat ketercapaian dan evaluasinya. Secara umum, hasil evaluasi yang dilaporkan dalam LAKIP menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UMKM sangat efektif atau amat baik dalam melaksanakan dan merealisasikan program-program kerja dan aktivitas pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah direncanakan selama 2008-2014.

Pertanyaannya, apakah hasil evaluasi kinerja tersebut sudah tepat dan merefleksikan realitas yang sesungguhnya? Apakah masih ada faktor-faktor atau aspek-aspek penting lain yang belum terefleksikan dalam penilaian tersebut namun sesungguhnya sangat penting untuk dieksplorasikan lebih jauh agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan operasional pembangunan koperasi dan UMKM Jawa Tengah pada tahun-tahun yang akan datang? Bagaimana juga pandangan atau persepsi dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu para kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota/Kabupaten, pelaku usaha koperasi dan UMKM, dan institusi-institusi terkait, terhadap kinerja koperasi dan UMKM serta kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan fungsi-fungsinya? Apakah sudah sungguh-sungguh efektif, tepat sasaran dan berdaya guna?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan suatu proses evaluasi kritis yang komprehensif terhadap perencanaan dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan serta efektivitas hasil yang sudah dicapai sebagai dasar untuk pertimbangan pengambilan keputusan manajerial dan penyusunan perencanaan strategis dan operasional ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui kondisi perkembangan program pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah sekaligus sebagai dasar untuk proses penyusunan perencanaan Koperasi dan UMKM Tahun 2016, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM 2010 - 2014.

1.2. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi efektivitas kinerja dan sinkronisasi program pemberdayaan KUMKM ini didasarkan pada DPA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM.

1.3. Tujuan

Analisis efektivitas kinerja dan sinkronisasi perencanaan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di Jateng.
2. Mengevaluasi dampak pemberdayaan Koperasi KUMKM Jateng terhadap produktivitas KUMKM, kesejahteraan masyarakat KUMKM, pertumbuhan KUMKM.
3. Menganalisis permasalahan internal dan eksternal di KUMKM Jawa Tengah.
4. Evaluasi sinkronisasi program pemberdayaan KUMKM tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
5. Mengusulkan optimalisasi program pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah.

1.3. Output Yang Diharapkan

Output yang diharapkan dihasilkan dari kajian ini adalah dokumen evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan KUMKM Tahun 2010–2014 yang berisi tentang:

1. Analisis kondisi makro masyarakat Koperasi dan UMKM Jawa Tengah,
2. Analisis efektivitas implementasi kebijakan dalam pengembangan Koperasi dan UMKM,
3. Analisis permasalahan internal dan eksternal koperasi dan UMKM, dan
4. Usulan atau Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ke depan.

1.5. Outcome Yang Diharapkan

Outcome atau implikasi dari hasil kajian ini adalah:

1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di Jateng.
2. Meningkatnya kesesuaian program Pemberdayaan KUMKM antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

Dalam perjalanan sejarah, di Indonesia telah berlaku beberapa sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dan masanya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Masa pra dan pasca kemerdekaan yang menganut sistem ekonomi kapitalis seperti Belanda, masa Republik Indonesia Serikat (RIS tahun 1950-1959) yang masih menganut sistem kapitalis liberal.
2. Tahun 1959-1966 (masa orde lama) yang menganut pada sistem ekonomi terpimpin.
3. Tahun 1966 sampai sekarang yang menganut sistem ekonomi yang khas Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila.

Beberapa tokoh yang mengemukakan tentang rumusan Sistem Ekonomi Pancasila antara lain Mubyarto, Emil Salim dan Sumitro Djojohadikusumo. Rumusan-rumusan tersebut mengandung makna yang sama, yakni Sistem Ekonomi Pancasila adalah demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dari lima sila dalam Pancasila. Terkait dengan demokrasi ekonomi tersebut, Mubyarto menyatakan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.

Terkait dengan koperasi, penyelenggaraan koperasi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Undang-undang tersebut pernah digantikan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip koperasi dan Pancasila. Pada sejumlah pasal dinilai mengandung atau mengusung semangat kapitalisme. Koperasi menurut Undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 dinyatakan sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata

perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut undang-undang tersebut koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuatu yang penting terkait dengan penyelenggaraan koperasi adalah azas koperasi, yakni kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koperasi diharapkan berperan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Terkait dengan tersebut, pada dasarnya koperasi telah memberikan kontribusi yang signifikan. Hal tersebut tercermin pada perkembangan koperasi selama lima tahun terakhir (Tabel 2.1). Namun demikian, seperti telah diketahui, koperasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan antara lain:

1. Lemahnya akses terhadap pasar
2. Lemahnya akses terhadap teknologi
3. Kapasitas sumberdaya manusia koperasi relatif rendah, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal
4. Dibandingkan dengan keberadaan UMKM, keberadaan koperasi relatif kurang dikenal
5. Lemahnya kaderisasi pengurus koperasi
6. Kegagalan koperasi pada masa lalu menyebabkan kepercayaan masyarakat pada koperasi relatif rendah

Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia

		2009	2014	Pertumbuhan (%)
koperasi unit	Jumlah	170,411	209,488	22.93
	Aktif	120,473	147,289	22.26
	Tdk Aktif	49,938	62,239	24.63
Jumlah Anggota		13,044,749	36,443,953	179.38
RAT (unit)		58,534	80,008	36.69
Jumlah Manajer (orang)		32,169	36,615	13.82
Jumlah Karyawan (orang)		325,161	530,830	63.25
Modal Sendiri (Rp.Juta)		28,348,728	105,800,829.73	273.21
Modal Luar (Rp. Juta)		31,503,882	94,861,986.91	201.11
Volume Usaha (Rp. Juta)		8,098,587	189,858,671.87	131.26
SHU (Rp. Juta)		5,303,814	14,898,647.12	180.90

2.2. Peran UMKM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (UMKM), yang dimaksudkan dengan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan:
 - a. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tidak diragukan lagi bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar dan sebagai salah satu mesin penggerak perekonomian. Sebagai penggerak perekonomian, UMKM memiliki berperan melalui kegiatan penyediaan atau produksi barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja maupun ekspor. Selain itu, pengalaman historis juga menunjukkan bahwa:

1. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu bertahan karena kelenturannya saat terjadi krisis ekonomi. Dalam pemulihan ekonomi dari krisis tahun 1997-1998, jumlah unit UMKM yang sangat besar (sekitar 41,36 unit usaha) telah menjadi solusi penyerapan tenaga kerja saat banyak perusahaan-perusahaan besar melakukan perampingan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Setiap investasi yang pada sektor UMKM dapat menciptakan kesempatan kerja lebih besar dibanding perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena investasi pada perusahaan besar cenderung *capital intensive*. Kondisi ini membuktikan kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja atau kesempatan kerja yang lebih luas berperan besar dalam upaya menurunkan angka pengangguran (lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia berada di sektor UMKM).

3. Menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar; serta
4. Memiliki jenis usaha yang cenderung berbasis pada sumberdaya lokal dan sangat sedikit tergantung pada bahan baku impor.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, peran UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga cenderung meningkat. Pada tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar 56,23 persen dan 56,6 persen pada tahun 2014. Dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada (Kementerian Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, 2014).

Seperti halnya peran UMKM dalam perekonomian Nasional, UMKM Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat besar, baik terhadap output maupun penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM di Jateng pada akhir tahun 2014 sebanyak 99.881 unit. Jumlah UMKM mengalami pertumbuhan yang semakin tinggi. Selama 5 tahun terakhir (2010 – 2014), jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM meningkat sebanyak 610.000 orang. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013, yakni meningkat sebesar 39,03 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini dapat dikaitkan dengan terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Sebagaimana peran UMKM pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, fenomena ini semakin menunjukkan bahwa sektor UMKM cukup kuat dalam menopang perekonomian secara keseluruhan.

2.3. Model-Model Pengembangan UMKM

2.3.1. Sentra Industri

Pengertian industri mengacu pada suatu usaha atau kegiatan mengolah bahan mentah untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sentra industri adalah pusat atau pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri (Permen) Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang

Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, pengertian Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/ lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (*entry point*) dari upaya pengembangan klaster. Dalam permen tersebut juga disebutkan pengertian Sentra UKM Unggulan, yaitu sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari klaster.

Dalam pendekatan sentra industri, pemerintah memberikan fasilitas penguatan finansial dan non finansial sebagai berikut:

Sentra UKM memperoleh:

- a. Perkuatan permodalan dengan penyediaan MAP melalui KSP/USP Koperasi;
- b. Penyediaan layanan pengembangan bisnis dari BDS-P/LPB;
- c. Layanan akses informasi bisnis melalui penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi;
- d. Diberikan akses fasilitas kredit dengan Dana Penjaminan.

Sentra UKM Unggulan dapat memperoleh perkuatan seperti sentra UMKM ditambah:

- a. Bantuan pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan mutu, desain dan merek produk;
- b. Fasilitas pengembangan kerjasama usaha.

Sentra UKM bagian Klaster Bisnis dapat memperoleh perkuatan seperti UKM unggulan ditambah dengan:

- a. Fasilitas penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil produk.
- b. Fasilitas pendidikan dan pelatihan.

2.3.2. Kluster

Konsep kluster memiliki kesamaan karakteristik dengan pengertian sentra industri, namun kluster memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Terdapat beberapa pengertian kluster yang dikembangkan oleh beberapa pihak, baik secara individual maupun secara kelembangaan. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Kluster adalah aglomerasi lokal perusahaan-perusahaan yang menghasilkan atau menjual produk sejenis atau komplemen pada sektor tertentu (United Nation for Industrial Development/UNIDO).
- b. Kluster adalah kumpulan perusahaan pada suatu wilayah tertentu serta menghasilkan produk sejenis atau komplemen (Swan, et al, 1998)
- c. Kluster dianalogikan sebagai tubuh manusia yang memiliki banyak anggota namun masing-masing saling terkait dan jadi satu tubuh. Dalam perspektif ini, kluster tidak hanya dilihat secara statis sebagai kumpulan perusahaan atau pun komplemen dalam suatu wilayah, namun merupakan transaksi dinamis dan pertukaran pengetahuan serta inovasi dalam mencapai keunggulan. Artinya, kluster tidak hanya mencakup aliran barang dan jasa antar perusahaan.
- d. Kluster adalah kumpulan perusahaan dan organisasi yang saling terkait berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan dan saling melengkapi serta berada pada wilayah geografis yang berdekatan (Porter, 1998a).

Model pengembangan UMKM pendekatan kluster ini menawarkan efektivitas dan efisiensi. Pengembangan UMKM dengan pendekatan kluster diharapkan mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas atau infrastruktur yang disediakan pemerintah serta meningkatkan efektivitas layanan program-program pemberdayaan UMKM. Pendekatan kluster juga menawarkan adanya keuntungan ekonomis yang disebabkan karena adanya aksi bersama yang mampu mengatasi keterbatasan industri kecil seperti permasalahan kekurangan modal, lemahnya akses pasar serta standardisasi produk. Penerapan model ini dipandang berhasil sehingga menarik perhatian para pelaku bisnis untuk meniru (*benchmarking*).

2.3.3. Inkubator Bisnis

Program inkubasi biasanya diterapkan bagi perusahaan yang masih tahap awal (*start-up*), berjalan kurang lebih 2 tahun. Pengembangan UMKM dengan pendekatan inkubator bisnis di Indonesia adalah seperti yang telah diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002. Menurut peraturan tersebut, inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

Sementara itu, yang dimaksud dengan inkubator adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi UKM untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Bertitik tolak dari kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa inkubator bisnis adalah suatu perusahaan atau institusi yang sengaja dibentuk atau dirancang untuk melakukan pembinaan serta mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui serangkaian program, yakni program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan atau pembinaan elemen bisnis lainnya. Inkubator bisnis bertujuan menjadikan suatu perusahaan menjadi perusahaan yang menguntungkan (*profitable*), memiliki pengelolaan organisasi derita keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang mampu bertahan (*sustainable*). Dengan demikian, pada akhirnya perusahaan tersebut tidak saja memberikan manfaat pada pemilik dan atau kekayaan perusahaan itu sendiri, namun juga memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa jenis bantuan yang diberikan inkubator bisnis antara lain: (a) akses pada sumber-sumber permodalan; (b) kemitraan atau pengembangan jaringan yang terkait untuk mendukung perkembangan usaha yang sedang dirintis; (c) pengembangan pemasaran; (d) pelatihan pembukuan dan membantu manajemen keuangan; (e) mentoring dan pelatihan bisnis; (f) pelatihan pengelolaan perusahaan dan budaya organisasi; (g) pengenalan etika bisnis; (h) pengenalan lingkungan eksternal bisnis, baik lingkungan industri maupun makro; dan (i) membantu pengurusan hal-hal yang terkait dengan regulasi.

2.3.4. OVOP

One village One Product (OVOP) pertama kali dikembangkan dan diterapkan di suatu kota kecil di Jepang, Oita oleh Mr. Hiramatsu pada tahun 1979. OVOP pertama kali diterapkan pada 50 desa dan menunjukkan keberhasilan. Melihat keberhasilan penerapan OVOP di Jepang, Thailand mengadopsinya dengan nama *One Tambon One Product* (OTOP).

Secara sederhana, gerakan OVOP ataupun OTOP adalah untuk mendorong desa untuk mengembangkan satu produk yang khas. OVOP pada dasarnya merupakan suatu program atau konsep dimana suatu wilayah atau suatu kawasan tertentu hanya mengembangkan satu jenis komoditas atau satu produk unggulan. Pengertian kawasan dalam hal ini adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu seperti wilayah desa, atau kecamatan (Thailand: Tambon). Model OTOP maupun OVOP dapat dikatakan sama dengan konsep *Agro-Ecological Zone* (AEZ) atau *Perwilayahan Komoditas Unggulan*, yakni mengarahkan suatu kawasan tertentu untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis komoditas pertanian dan industri unggulan.

Dengan hanya mengembangkan suatu produk tertentu maka efektifitas pengembangan UMKM akan diperoleh dari adanya diferensiasi produk yang dihasilkan. Tanpa adanya diferensiasi (dalam kasus produk bersifat homogen seperti dalam pasar persaingan sempurna), harga ditentukan oleh tarik menarik antara permintaan dan penawaran pasar. Akibatnya, semua produsen tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga atau pengambil harga. Demikian, ketika produk-produk hasil pertanian (identik dengan produk pedesaan) tidak terdiferensiasi maka para produsen tidak punya kekuatan mempengaruhi pasar.

Dalam kegiatan OVOP terdapat banyak produsen yang memproduksi produk sejenis dengan sedikit diferensiasi. Meskipun terbatas, adanya diferensiasi produk memberikan kekuatan pada produsen untuk mempengaruhi pasar seperti halnya pasar persaingan monopolistik. Diferensiasi memberikan kesempatan bagi produsen untuk melakukan berbagai aktivitas penjualan seperti promosi, keputusan pendistribusian, pelayanan dan lainnya. Kondisi demikian memungkinkan perusahaan-perusahaan produk-produk pedesaan memiliki daya saing dalam pasar, baik dalam pasar domestik maupun luar negeri.

BAB III

METODE EVALUASI

3.1. Jenis Riset

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-evaluatif dengan konsentrasi pada evaluasi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM. Meskipun kajian bersifat deskriptif, namun juga akan dikaji hubungan sebab-akibat satu variabel dengan variabel yang lain.

3.2. Lokasi Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Namun, survei/observasi hanya akan dilakukan pada beberapa kabupaten/kota terpilih.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam evaluasi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan KUMKM Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta pelaku KUMKM, dan masyarakat *stakeholder* lainnya. Sampling kabupaten kota terpilih akan dilakukan dengan pendekatan *stratified sampling*, yakni sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan dikelompokkan lebih dahulu menurut kelompok status ekonomi yakni kabupaten kota dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi, sedang dan rendah.

Selanjutnya, pada masing-masing kelompok PDRB akan diambil sampel tiga kabupaten/kota atau total 9 Kabupaten dengan masing-masing sebanyak 25 unit usaha, yang terdiri dari UMKM, koperasi simpan pinjam (KSP) dan non KSP. Sampel ditentukan dengan pendekatan *convenience sampling* namun tetap memperhatikan sebaran responden serta keterwakilan masing-masing unsur. Berdasarkan kriteria tersebut, dalam kajian ini dipilih Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus untuk daerah dengan PDRB per kapita tinggi; Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara untuk kelompok

PDRB per kapita sedang; sementara Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan untuk daerah dengan pendapatan per kapita rendah (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Urutan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

	Kab	PDRB percapita	Urutan	Bakorwil
2	19. Kab. Kudus	17,043,990.02	1	1
1	33. Kota Semarang	14,845,163.20	2	1
3	31. Kota Surakarta	11,269,881.84	3	2
	30. Kota Magelang	10,337,809.08	4	2
	01. Kab. Cilacap	8,642,297.99	5	3
	34. Kota Pekalongan	8,004,723.31	6	3
	13. Kab. Karanganyar	7,256,977.70	7	2
	24. Kab. Kendal	6,513,515.28	8	1
	11. Kab. Sukoharjo	6,443,493.54	9	2
	22. Kab. Semarang	6,426,370.88	10	1
	32. Kota Salatiga	5,724,888.16	11	1
	09. Kab. Boyolali	4,956,964.63	12	2
	35. Kota Tegal	4,849,866.19	13	3
	06. Kab. Purworejo	4,696,902.25	14	2
3	10. Kab. Klaten	4,519,986.74	15	2
2	18. Kab. Pati	4,192,386.61	16	3
2	20. Kab. Jepara	4,160,397.62	17	1
	26. Kab. Pekalongan	4,138,309.46	18	3
	17. Kab. Rembang	4,109,448.16	19	1
	14. Kab. Sragen	3,982,702.77	20	2
	08. Kab. Magelang	3,725,600.04	21	2
	23. Kab. Temanggung	3,624,491.54	22	2
	25. Kab. Batang	3,584,418.85	23	3
	04. Kab. Banjarnegara	3,580,008.63	24	3
3	12. Kab. Wonogiri	3,514,313.04	25	2
	29. Kab. Brebes	3,435,377.63	26	3
	02. Kab. Banyumas	3,257,266.98	27	3
	03. Kab. Purbalingga	3,242,961.83	28	3
1	21. Kab. Demak	3,026,089.17	29	1
	27. Kab. Pemalang	2,967,912.83	30	3
	28. Kab. Tegal	2,815,765.06	31	3
	05. Kab. Kebumen	2,740,461.47	32	3
	07. Kab. Wonosobo 6	2,690,479.10	33	2
	16. Kab. Blora	2,689,689.83	34	1
1	15. Kab. Grobogan	2,671,936.85	35	1

3.4 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari para narasumber Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, para pelaku koperasi dan UMKM dan pihak-pihak *stakeholder* terkait. Data ini dipergunakan untuk menjawab tujuan penelitian, analisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan KUMKM dan analisis masalah eksternal dan internal KUMKM. Sedangkan data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan sumber-sumber yang relevan dan digunakan untuk menganalisis kondisi makro ekonomi masyarakat KUMKM Jawa Tengah dan sebagai data pendukung dalam proses pembuatan rekomendasi.

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah:

1. Kuesioner persepsi responden mengenai efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM
2. Dokumen-dokumen resmi terkait dengan program pemberdayaan KUMKM Provinsi Jawa Tengah seperti RPJMD, RENSTRA, LAKIP, PDRB, Jawa Tengah Dalam Angka dan lain-lain.
3. Panduan FGD dan *indepth interview* bagi pemangku kepentingan

Data, variabel dan indikator yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data, variabel dan indikator

Variabel	Indikator
Evaluasi signifikansi, relevansi dan efektivitas	
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan 2. Kelembagaan yang membidangi pemberdayaan KUMKM 3. Sumberdaya yang tersedia <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah anggaran b. Ketersediaan fasilitas dan sarana penunjang c. Sistem birokrasi d. Kesadaran dan kepedulian dunia usaha e. Kesadaran masyarakat
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan dan penganggaran program 2. Proses pembinaan kepada KUMKM 3. Proses implementasi 4. Proses sosialisasi 5. Proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program 6. Proses koordinasi 7. Proses peningkatan kompetensi SDM 8. Proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kinerja KUMKM

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> a. Tercapainya tujuan kebijakan b. Ketepatan waktu pelaksanaan program
Dampak program	
Manfaat yang dirasakan atas pelaksanaan program pengembangan ketepatan waktu pelaksanaan program pengembangan KUMKM	Data primer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan manajemen 2. Peningkatan produksi yang dihasilkan 3. Peningkatan omset/penjualan 4. Bertambahnya saluran pemasaran produk Data sekunder <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan jumlah KUMKM 2010-2014 per kabupaten/kota 2. Penyerapan tenaga kerja KUMKM 2010-2014 per kabupaten/kota 3. Nilai produksi /omset/ penjualan KUMKM 2010-2014 per kabupaten/kota 4. Nilai kredit yang dikucurkan perbankan pada KUMKM 2010-2014 per kabupaten/kota
Analisis SWOT	
Faktor internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor organisasi 2. Faktor lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Budaya dan etos kerja 3. SDM bagian penyuluhan dan pembinaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas b. Motivasi c. Karakter d. Keterlibatan 4. Pratik manajemen <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan tujuan strategis b. Pencarian dan pemanfaatan sumberdaya c. Proses komunikasi d. Penciptaan lingkungan prestasi e. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Faktor eksternal → pelaku KUMKM dan dunia global	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan b. Pengalaman kerja c. Motivasi d. Jiwa kewirausahaan 2. Keuangan 3. Pasar <ol style="list-style-type: none"> a. Saluran distribusi b. Kemudahan mendapat pasar c. Tekanan dan persaingan pasar

3.5 Teknik Analisis Data

Tujuan utama dari kajian ini adalah mengevaluasi program pemberdayaan KUMKM Jawa Tengah 2010-2014 yang terdiri dari:

- a. Mengevaluasi relevansi dan signifikansi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di Jateng

- b. Mengevaluasi dampak pemberdayaan KUMKM Jateng terhadap produktivitas KUMKM, kesejahteraan masyarakat KUMKM, dan pertumbuhan KUMKM,
- c. Menganalisis permasalahan internal dan eksternal KUMKM di Jawa Tengah
- d. Mengusulkan optimalisasi program pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah.

Berdasarkan tujuan tersebut maka metode yang digunakan berturut-turut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan kajian pertama didekati dengan melakukan proses inventarisasi dan evaluasi program-program pemberdayaan KUMKM Jawa Tengah pada tahun 2010-2014. Untuk mencapai tujuan ini akan dilakukan observasi dan survei lapangan (FGD, *indepth interview* dan kuesioner) serta data sekunder. Fokus analisis adalah pada:
 - 1) Relevansi dan signifikansi. Relevansi dan signifikansi program pemberdayaan KUMKM digunakan untuk mengidentifikasi terhadap jenis program yang dibutuhkan oleh KUMKM serta sasaran program.
 - 2) Daya guna kebijakan dan program mengukur manfaat program bagi pengembangan KUMKM berkenaan dengan: (1) apakah terdapat perubahan terhadap struktur dan perilaku pasar; dan (2) apakah terdapat perubahan terhadap kinerja UMKM.
- b. **Efektivitas program.** Secara kuantitatif, efektifitas dilakukan dengan membandingkan antara target dengan capaian sebagaimana dipaparkan dalam LAKIP. Secara kualitatif, efektivitas akan diukur dengan melakukan survei pada pemangku kepentingan KUMKM. Survei persepsi ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan program.

Tujuan kajian kedua untuk melihat dampak program pemberdayaan KUMKM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat umum dan masyarakat KUMKM dilakukan melalui FGD terhadap pelaku KUMKM dan masyarakat umum, serta menggunakan data sekunder untuk melihat pertumbuhan omset/penjualan, produksi, penyerapan tenaga kerja, saluran distribusi dan lain sebagainya. Dalam *indepth interview* dan FGD diharapkan dapat diketahui permasalahan yang sebenarnya dari implementasi program pemberdayaan KUMKM.

- a. Analisis permasalahan internal dan eksternal dilakukan dengan menggunakan metode SWOT.
- b. Analisis sinkronisasi program pemberdayaan KUMKM tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan dengan melakukan konformasi atas program-program pemberdayaan KUMKM yang diselenggarakan oleh Provinsi dengan masing-masing Kabupaten/Kota.
- c. Rekomendasi optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan seluruh proses dari tujuan satu sampai dengan lima.

Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data peneliti/pengamat lain.

Untuk analisis kinerja anggaran, evaluasi aspek keuangan dilakukan untuk tujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran. Analisis yang dilakukan terdiri dari:

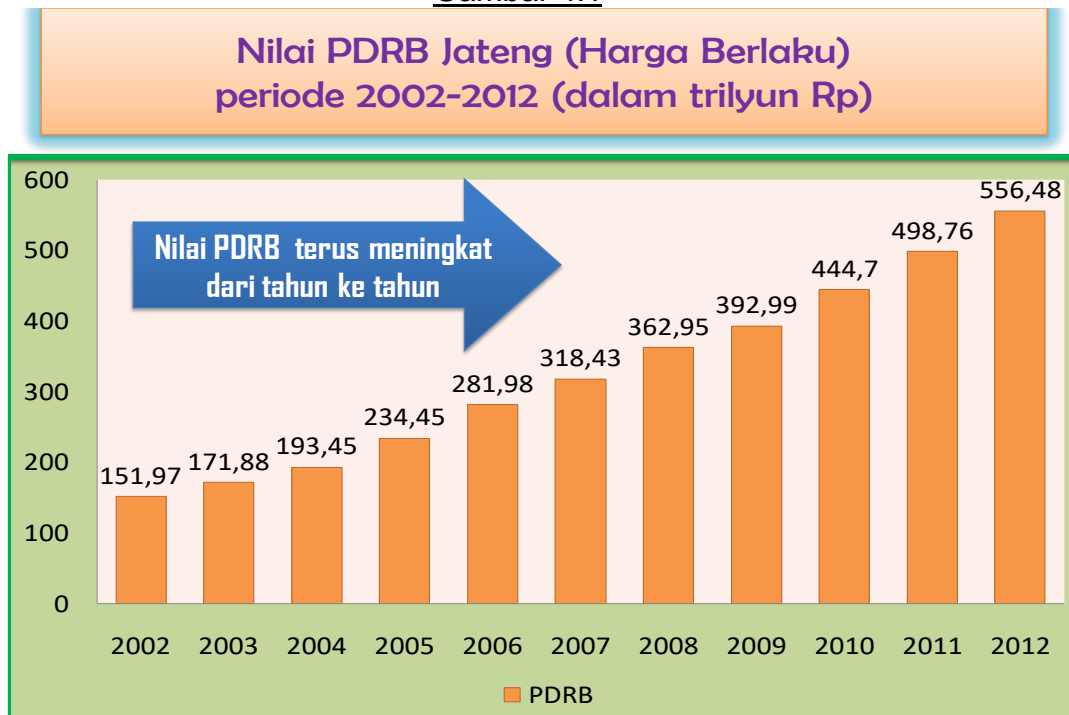
1. Perkembangan kucuran dana ke sektor KUMKM dari berbagai sumber menurut skema program. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pendanaan untuk sektor KUMKM, pertumbuhannya dari tahun ke tahun, dan proporsi sumber-sumber pendanaan.
2. Perkembangan anggaran KUMKM (analisis horisontal). Analisis horisontal dilakukan dengan membandingkan anggaran dari tahun ke tahun, baik total anggaran maupun per kelompok anggaran atau kelompok kegiatan.
3. Alokasi anggaran KUMKM per kelompok anggaran (analisis vertikal). Analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan proporsi anggaran antar kelompok mata anggaran/kelompok kegiatan.
4. Perbandingan target dan realisasi anggaran (evaluasi anggaran/realisasi).

BAB IV
KONDISI PEREKONOMIAN DAN KUMKM
PROVINSI JAWA TENGAH

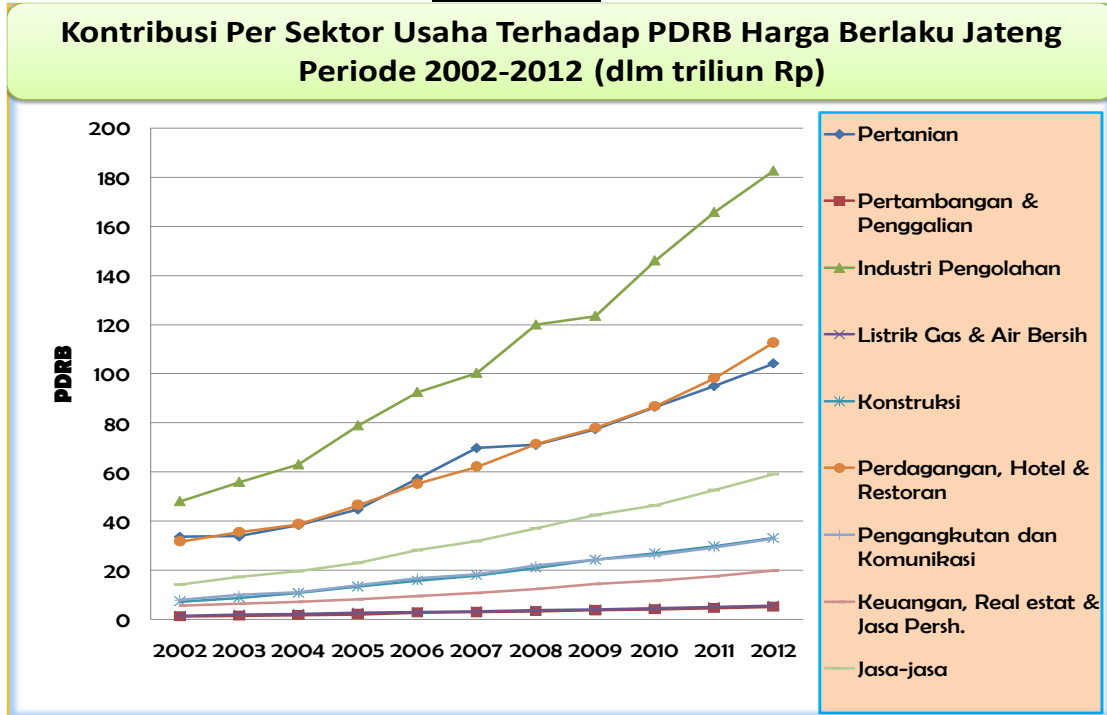
4. 1. Tinjauan Kinerja Perekonomian Jawa Tengah

Dalam 13 tahun terakhir, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan hasil analisis kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Jateng periode 2002-2012 yang dilakukan Lako (2013), tren nilai PDRB Jateng terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 4.1 memperlihatkan nilai PDRB Jateng terus meningkat selama 2002-2012. Sementara Gambar 4.2 memperlihatkan sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor pertanian memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Jateng dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi yang besar tersebut juga terus berlanjut hingga tahun 2013 yang mencapai 623,7 trilyun dan Rp 700,07 trilyun pada tahun 2014.

Gambar 4.1



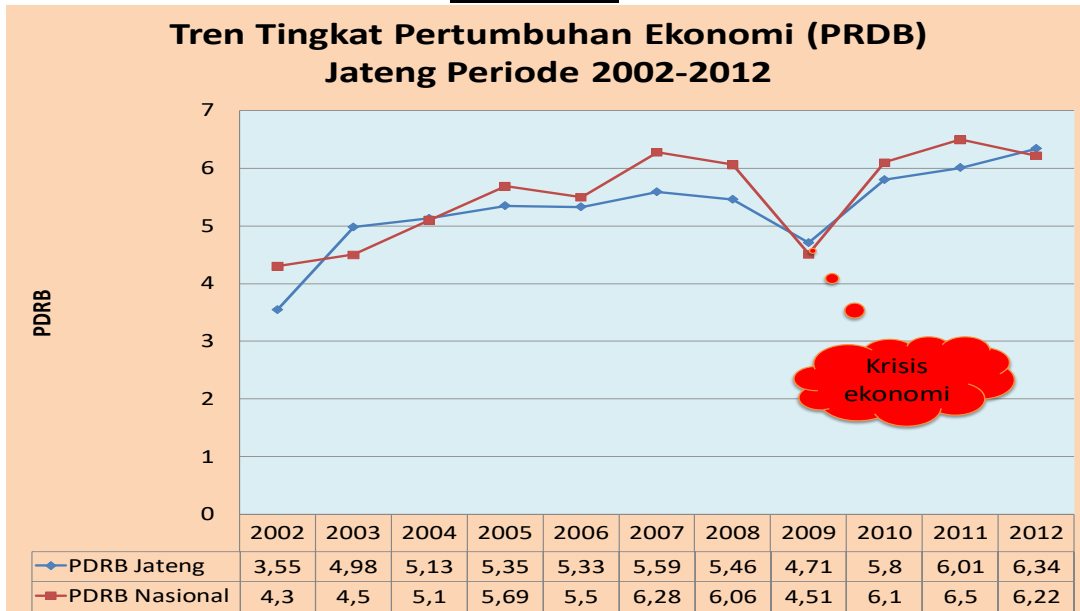
Gambar 4.2



Secara keseluruhan, kinerja perekonomian Jateng selama tahun 2002-2012 cukup bagus (lihat Gambar 4.3). Hal ini tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2009. Bahkan, setelah terkena imbas krisis keuangan global pada 2009, tren pertumbuhan ekonomi Jateng terus meningkat hingga mencapai 6,34 persen pada 2012. Bahkan pada 2012, kinerja pertumbuhan ekonomi Jateng lebih baik daripada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (6,22 persen).

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kembali menurun menjadi 5,8 persen; dan menurun lagi menjadi 5,47 persen pada tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan oleh semakin memburuknya kinerja perekonomian dunia dan nasional yang berimbas negatif pada sendi-sendi kehidupan dari sektor-sektor perekonomian Jateng.

Gambar 4.3



Peningkatan kinerja perekonomian selama beberapa tahun terakhir ternyata juga berdampak positif pada kesejahteraan sosial masyarakat. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) selama 2008-2013, jumlah penduduk miskin Jateng terus menurun dari 6,19 juta orang (2008) menjadi 4,8 juta orang (2012), 4,74 juta orang (2013) dan 4,56 juta orang (2014). Peningkatan tersebut juga berdampak positif pada penurunan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran terbuka terus menurun dari 1,25 juta (2009) orang menjadi 0,96 juta pada 2012. Namun seiring dengan memburuknya kondisi perekonomian global, nasional dan daerah, jumlah pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 0,98 juta orang pada tahun 2013 dan 0,99 juta orang pada tahun 2014.

Peningkatan pesat kinerja perekonomian Jawa Tengah selama satu dekade terakhir sehingga menimbulkan berbagai dampak positif pada sejumlah kinerja sosial-ekonomi bagi kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari peran sektor koperasi dan UMKM yang sedang digalakkan masyarakat dan pemerintah sejak tahun 2008 hingga kini. Kontribusi sosial dan ekonomi dari sektor usaha koperasi dan UMKM terus mengalami peningkatan signifikan dari sisi pemberian kredit untuk modal kerja dan investasi oleh perbankan, peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang disumbangkan oleh sektor koperasi dan UMKM.

4.2. Tinjauan Kinerja Koperasi Jawa Tengah

Perkembangan jumlah koperasi di Jawa Tengah selama periode 2008–2013 mengalami peningkatan yang pesat. Pada 2008, jumlah Koperasi sebanyak 17.617 unit dan meningkat menjadi 27.215 unit pada 2013 dan 27.784 unit pada 2014. Dari jumlah tersebut, jumlah koperasi aktif mencapai 21.832 unit (2013) dan 22.563 unit (2014), sementara koperasi yang tidak aktif berjumlah 5.343 unit pada akhir tahun 2013 dan 5221 unit pada akhir 2014. Uraian tentang perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif disajikan dalam Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif, dan Koperasi Tidak Aktif (Unit)

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng 2013-2018

Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi, dimana semula berjumlah 4.576.355 orang (2008) menjadi 6.471.928 orang (2013) 41,42% dan 7.042.616 orang (2014). Gambar 4.5 menyajikan perkembangan jumlah anggota koperasi dari 2008–2013.

Gambar 4.5. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi (orang)

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng 2013-2018

Peningkatan jumlah koperasi tersebut juga turut menyerap tenaga kerja. Dari Gambar 4.6 terlihat jumlah tenaga kerja yang terserap sektor koperasi terus meningkat. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja koperasi adalah 51.048 orang, kemudian meningkat menjadi 119.657 orang pada 2013 atau meningkat 134,40% dan menjadi 135.856 orang pada tahun 2014 (lihat Gambar 4.6).

Gambar 4.6. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi (orang)

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng 2013-2018

Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah omzet Koperasi pada 2008 adalah Rp. 11,179 trilyun, lalu meningkat menjadi Rp37,480 trilyun pada tahun 2013 atau tumbuh 235,27% dan Rp41,58 trilyun pada 2014. Demikian juga aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang pesat dari Rp. 8,320 trilyun (2008) menjadi Rp. 33,501 trilyun (2013) atau tumbuh 302,66% dan menjadi Rp41,456 trilyun pada tahun 2014. Tren pertumbuhannya bisa dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi (trilyun Rp)

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng 2013-2018

4.3. Tinjauan Kinerja Koperasi dan UMKM Jawa Tengah

Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam program pembangunan nasional tidak perlu disangsikan lagi. Peran UMKM dalam penciptaan kesempatan kerja maupun sumbangannya terhadap output nasional semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perhatian dari berbagai pihak semakin dicurahkan ke jenis usaha berskala mikro, kecil dan menengah tersebut.

Menyadari akan pentingnya peran UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian, pemerintah telah dan terus berusaha melakukan upaya pengembangan serta pemberdayaan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, paparan di bawah ini mendeskripsikan perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah menurut kontribusinya terhadap keseluruhan industri, perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, perkembangan aset maupun omzetnya.

4.2.1 Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah Menurut Jumlah Unit Usaha

Perkembangan jumlah unit UMKM Provinsi Jawa Tengah menurut sektor menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1, jumlah usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah pada jenis usaha non pertanian dalam 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 61,80 persen, yaitu dari 21.205 unit usaha pada tahun 2010 menjadi 34.309 unit usaha pada tahun 2014. Sementara ini, jika dibandingkan kondisi pada tahun 2008 dengan jumlah UMKM sebanyak 20.343 unit usaha, jumlah unit usaha non pertanian meningkat sebesar 68,65 persen. Setiap tahunnya, jumlah UMKM sektor UMKM non pertanian meningkat dengan rata-rata 9,23 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 (15,02 persen).

Jumlah UMKM sektor pertanian selama periode 2008 – 2014 meningkat lebih dari 100 persen, (113,58 persen), yaitu dari 8.305 unit usaha menjadi 17.738 unit usaha (2014). Sementara itu, jika hanya diambil selama 5 tahun terakhir (2010-2014), jumlah UMKM untuk jenis usaha pertanian tumbuh sebesar 81,46 persen, yaitu dari 9.775 unit usaha (2010) menjadi 17.738 unit usaha (2014).

Untuk jenis UMKM perdagangan, meskipun memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibanding dengan jenis usaha lainnya (26,84 persen selama 5 tahun terakhir), namun secara keseluruhan proporsi jumlah UMKM perdagangan terhadap total UMKM cukup besar, yakni mencapai 43,56 persen pada tahun 2008; 41,78 persen pada tahun 2010. Berbeda dengan jumlah UMKM non pertanian yang cenderung mengalami peningkatan proporsi, proporsi UMKM perdagangan cenderung menurun, yakni 35,83 pada tahun 2014.

Seperti pada jenis UMKM lainnya, pola perkembangan UMKM jasa juga cenderung meningkat meskipun memiliki jumlah yang sama pada tahun 2008 dan 2009 (7.639 unit usaha), serta tahun 2010 dan 2011 (8,389 unit usaha). Dilihat dari proposinya terhadap jumlah total UMKM, proporsi UMKM jasa cenderung tetap pada kisaran 11 persen.

Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah 2008 - 2014

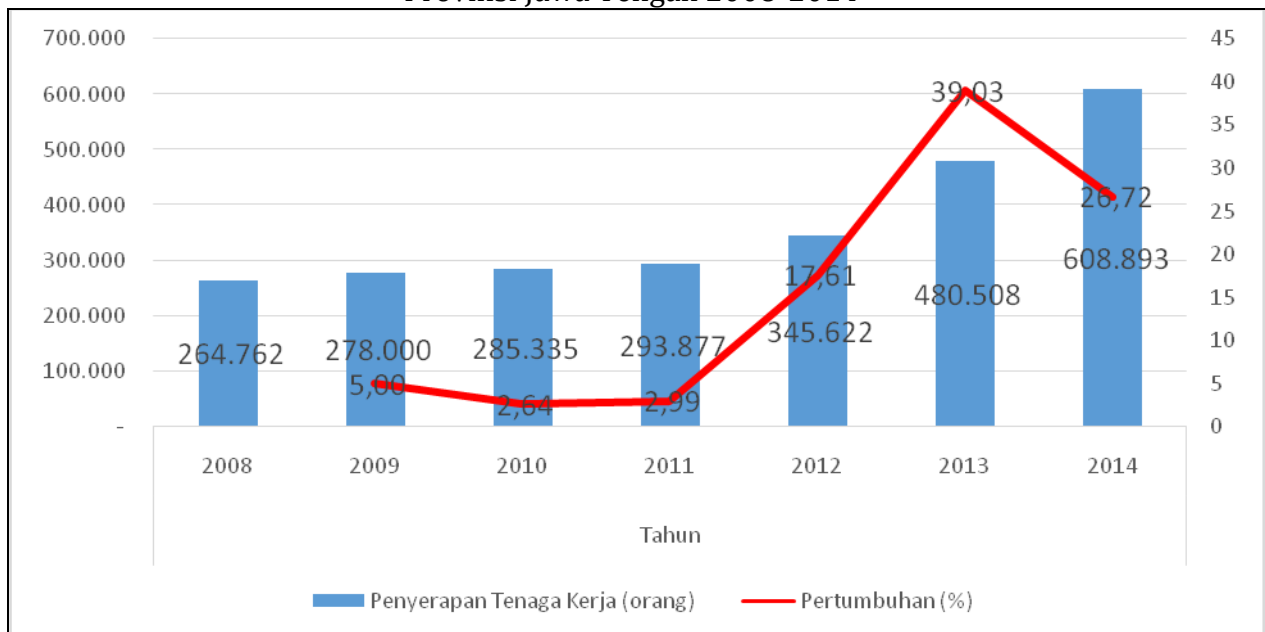
Deskripsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Non Pertanian (unit)	20,343	20,682	21,205	23,374	26,171	30,103	34,309
Pertumbuhan (%)		1.67	2.53	10.23	11.97	15.02	13.97
Proporsi thd Total UMKM (%)	31.64	31.39	31.36	33.29	32.48	33.32	34.42
Pertanian (unit)	8,305	9,385	9,775	10,097	13,242	15,819	17,738
Pertumbuhan (%)		13.00	4.16	3.29	31.15	19.46	12.13
Proporsi thd Total UMKM (%)	12.92	14.25	14.46	14.38	16.43	17.51	17.79
Perdagangan (unit)	28,007	28,172	28,247	28,362	32,055	33,958	35,829
Pertumbuhan (%)		0.59	0.27	0.41	13.02	5.94	5.51
Proporsi thd Total UMKM (%)	43.56	42.76	41.78	40.39	39.78	37.59	35.94
Jasa (unit)	7,639	7,639	8,389	8,389	9,115	10,459	11,805
Pertumbuhan (%)		-	9.82	-	8.65	14.74	12.87
Proporsi thd Total UMKM (%)	11.88	11.60	12.41	11.95	11.31	11.58	11.84
Jumlah	64,294	65,878	67,616	70,222	80,583	90,339	99,681
Pertumbuhan (%)		2.46	2.64	3.85	14.75	12.11	10.34
Proporsi thd Total UMKM (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4.2.2 Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah Menurut Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Seiring dengan peningkatan jumlah UMKM pada berbagai jenis usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan yang semakin tinggi (Gambar 4.8). Selama 5 tahun terakhir (2010 – 2014), jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM meningkat sebanyak 323.558 unit usaha atau meningkat sebesar 113,40 persen. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013, yakni meningkat sebesar 39,03 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini dapat dikaitkan dengan terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008.

Sebagaimana peran UMKM pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, fenomena ini semakin menunjukkan bahwa sektor UMKM cukup kuat dalam menopang perekonomian secara keseluruhan. Peristiwa krisis biasanya berdampak pada besarnya jumlah pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena banyak perusahaan besar di sektor formal yang mengalami kebangkrutan. Untuk dapat bertahan dan memperoleh penghasilan untuk diri maupun keluarganya, dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur sering terpaksa untuk bekerja di sektor informal maupun membuka usaha sendiri di sektor informal. Kondisi demikian menunjukkan semakin strategisnya posisi UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan permasalahan pembangunan. Secara keseluruhan, kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM mencapai lebih dari 80 persen total tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4.8. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM Provinsi Jawa Tengah 2008-2014



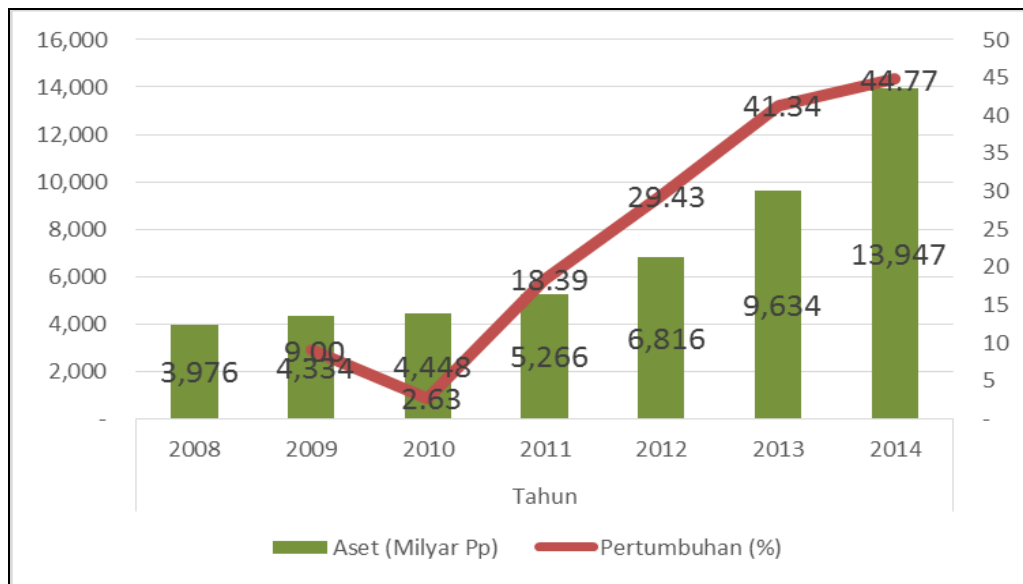
1) Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah Menurut Jumlah Aset

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mengenai perkembangan aset UMKM 2008–2014, terlihat aset dari unit-unit UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah terus meningkat nilainya. Secara keseluruhan, Gambar 4.9 menunjukkan bahwa aset UMKM cenderung

meningkat seiring dengan perkembangan jumlah UMKM. Dalam 5 tahun terakhir, aset UMKM Provinsi Jawa Tengah meningkat lebih dari 200 persen, yakni 4.448 milyar pada tahun 2010 menjadi 13.947 Milyar pada tahun 2014.

Secara rata-rata, aset UMKM tumbuh 24,26 persen per tahun. Dengan membandingkan pertumbuhan jumlah UMKM (sekitar 8 persen per tahun) dengan pertumbuhan aset UMKM (sekitar 24 persen per tahun) maka terlihat perkembangan aset UMKM terjadi bukan hanya sekedar karena jumlah UMKM yang semakin banyak, tapi juga disebabkan kondisi keuangan UMKM secara keseluruhan yang semakin baik.

Gambar 4.9. Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah Menurut Aset selama 2008-2014

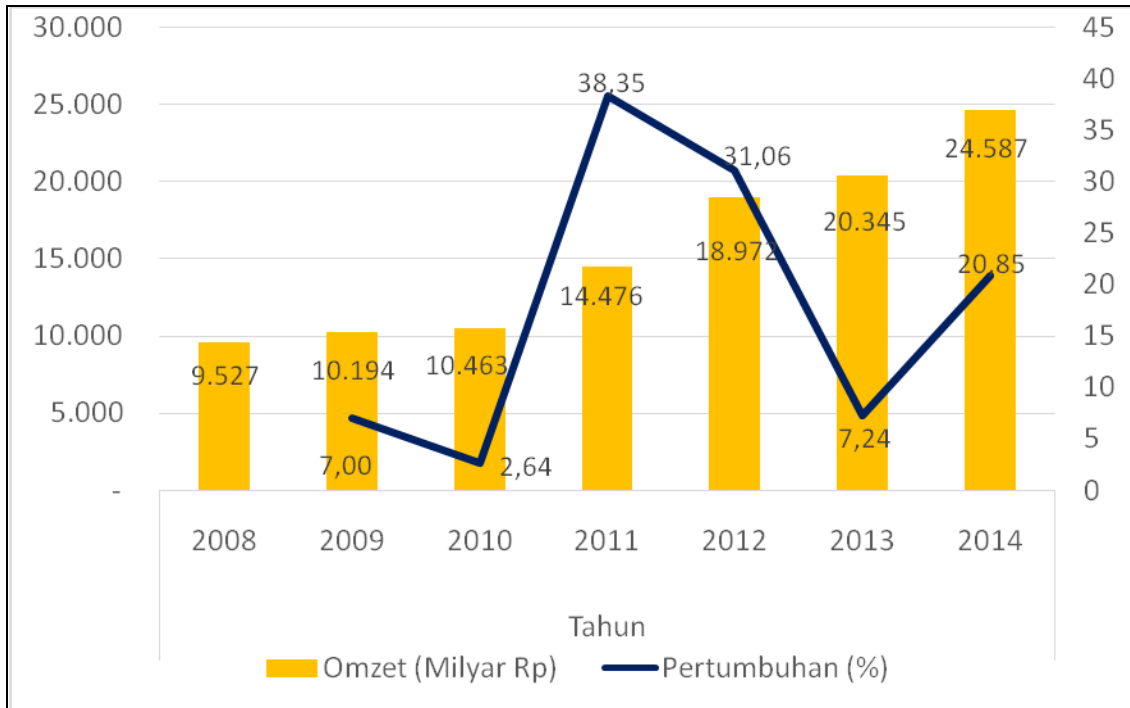


2) Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah Menurut Omzet

Gambar 4.10 menyajikan data perkembangan omzet UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 - 2014. Meskipun laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif, yakni rendah pada tahun 2010 (2,64 persen) dan sangat tinggi pada tahun 2012 (38,35 persen) namun secara keseluruhan omzet UMKM Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat selama 2014. Adanya kenaikan omzet yang cukup signifikan, yaitu rata-rata 17,86 persen per tahun mencerminkan adanya peningkatan transaksi pada sektor UMKM serta peningkatan pendapatan para pedagang di sektor UMKM karena peningkatan volume perdagangan. Volume perdagangan yang meningkat pada sisi yang lain menunjukkan permintaan terhadap hasil produksi UMKM meningkat. Kondisi

tersebut mendorong peningkatan jumlah produksi UMKM sebagai pemasok yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 4.10. Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Tengah Menurut Omzet Selama 2008-2014



BAB V

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

5.1. Telaah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM

Komitmen, kebijakan dan strategi pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah bisa ditelusuri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, dan Tahun 2014-2018, dan Rencana Strategis (Renstra) dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan Tahun 2013-2018.

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 adalah *"Jawa Tengah Yang Mandiri, maju, Sejahtera, dan Lestari."* Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi ke-2 dari Pembangunan Jawa Tengah adalah: *"Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan."* Dalam Misi ke-2 tersebut tampaknya pembangunan Koperasi dan UMKM (KUMKM) mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena KUMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Perhatian tersebut tercermin dalam Arah dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yaitu pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2008).

Untuk merealisasikan Misi ke-2 dan Arah serta Prioritas Pembangunan berkaitan dengan KUMKM dalam RPJPD tersebut, dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi perhatian khusus pada pembangunan KUMKM. Hal tercermin dari Misi ke-2 RPJMD Tahun 2008-2013 yaitu: *Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya.* Perhatian tersebut dipertegas dalam Sasaran Pembangunan Daerah untuk Tujuan ke-5 yaitu *Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro,*

Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri. Sasarannya adalah: (1) Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia; (2) tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat; (3) berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi, serta sistem perlindungan yang memadai; (4) berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (5) berkembangnya pasar regional, dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2009).

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pembangunan Koperasi dan UMKM juga dilanjutkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang mengusung Visi Pembangunan: “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI *“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”*”. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Misi, namun dari uraian yang dimunculkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013-2018 terlihat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian pada Koperasi dan UMKM pada Misi ke-2 yaitu: *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, serta Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.”* Pada salah satu Tujuan dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan Koperasi dan UMKM (KUMKM). Sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas KUMKM (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014).

Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Tujuannya adalah sebagai pedoman SKPD dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 2008-2013. Renstra tersebut juga memberikan pedoman bagi penyusunan RENJA_SKPD Dinas Koperasi dan UMKM yang memuat tentang strategi, arah kebijakan program dan kegiatan indikatif (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2009).

Dalam Renstra_SKPD Tahun 2008-2013, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah merumuskan Visi Pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai berikut: *“Koperasi dan*

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Mandiri, Tangguh, Berdaya Saing, Berperan Utama Dalam Perekonomian Rakyat Jawa Tengah.” Misinya adalah:

1. Mewujudkan SDM Pengelola Koperasi dan UMKM yang profesional
2. Mewujudkan Iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan KUMKM
3. Menumbuhkembangkan lembaga keuangan mikro (koperasi simpan-pinjam/ unit simpan-pinjam koperasi) sampai wilayah pedesaan
4. Membangun dan mengembangkan jaringan distribusi dan *networking* ekonomi sampai pedesaan
5. Mengembangkan Koperasi dan UMKM berbasis produk unggulan daerah yang bertumpu pada sumberdaya lokal,
6. Menumbuhkan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kemandirian KUMKM; (2) meningkatnya proporsi usaha kecil formal; (3) meningkatnya potensi produk koperasi dan UMKM yang berorientasi ekspor; (4) bertumbuhnya wirausaha baru dan kesempatan kerja; dan (5) meningkatnya kualitas SDM dan kuliatas kelembagaan KUMKM.

Visi, Misi dan Sasaran dalam Renstra-SKPD tersebut dilanjutkan dalam Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. Dalam Renstra-SKPD 2013-2018. Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelayanan KUMKM, telaah Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Koperasi and UKM RI, serta isu-isu strategis pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah, maka Visi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 adalah **“SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM”**. Adapun Misinya adalah:

1. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat.

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi

2. Mengembangkan produk unggulan daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.

Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Jateng melalui peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengangguran di Jateng. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

4. Mewujudkan SDM pengelola koperasi dan UMKM yang kompeten.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas SDM KUMKM.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan aparatur pembina KUMKM yang profesional serta peningkatan kualitas perencanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Sementara sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperas dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selama 2013-2018 adalah:

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
2. Bertambahnya jumlah produk OVOP berbasis koperasi dan meningkatnya daya saing KUMKM.
3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.
4. Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM.
5. Meningkatnya kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta meningkatnya kualitas SDM aparatur (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014).

Selain RPJPD dan RPJMD yang memberikan arahan strategis untuk pembangunan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerbitkan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan, pengembangan dan perberdayaan Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi menerbitkan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi. Perda tersebut kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.

Berkenaan dengan pengelolaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan UMKM dengan menerbitkan Perda dan Pergub. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perda tersebut kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.53 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha, Mikro, dan Menengah.

Untuk mendukung jaminan pemberian kredit usaha kepada pelaku koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jamkrida). Perda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara tujuan dari pembentukan PT. Jamkrida Jateng adalah untuk memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sejumlah regulasi dan kebijakan tersebut di atas, terlihat bahwa Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan dinas-dinas terkait berkomitmen kuat untuk membangun dan memberdayakan koperasi dan UMKM. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kinerja dan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari hasil telaah literatur yang dilakukan tim terhadap laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan Bank

Indonesia, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah sumber lainnya ditemukan bahwa sejumlah regulasi dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan mencapai hasil yang efektif. Hal ini tercemin dari pertumbuhan kinerja ekonomi koperasi dan UMKM serta kontribusinya bagi perekonomian daerah. Koperasi dan UMKM juga telah memberikan kontribusi sosial yang besar berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/kota, para pelaku Koperasi dan UMKM dan para pimpinan instansi terkait juga menunjukkan bahwa aturan-aturan dan kebijakan pengelolaan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM dari pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah sangat jelas dan mendorong kemajuan koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Namun demikian, yang masih lemah adalah pelaksanaannya. Peran pemerintah dalam pendampingan dan pemberdayaan, koordinasi dan pengendalian terhadap koperasi dan UMKM terasa masih kurang atau lemah sehingga perlu ditingkatkan lagi ke depan.

5.2. Telaah Empiris

Dalam sub bab ini dilakukan kajian mengenai evaluasi, relevansi dan efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil FGD dan kuesioner. Evaluasi akan dilihat dari tiga kegiatan utama yang dilakukan oleh Dinas KUMKM yaitu dari sisi input, proses dan output. Evaluasi dilakukan oleh para pemangku kepentingan dinas koperasi dan UMKM serta SKPD terkait, juga dilakukan oleh pelaku KUMKM.

5.2.1. Input

Dari sisi input, evaluasi dilakukan dengan melihat sisi kebijakan, kelembagaan dan sumberdaya yang tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, terlihat bahwa kebijakan, peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pemerintah pusat, Provinsi

dan Kabupaten/kota yang terkait dengan UMKM sudah sangat banyak dan memadai. Peraturan perundang-undangan terkait dengan UMKM antara lain adalah sebagai berikut.

1. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
3. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
4. UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian
5. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
6. UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian
7. UU No. 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah
8. Peraturan Gubernur No. 53/2014 tentang juknis pelaksanaan Peraturan Daerah 13/2013
9. Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Koperasi.
10. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk UMK
11. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
12. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
13. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
14. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
15. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang IUI
16. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan & Tatacara Pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi
17. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
18. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah

19. Peraturan Pemerintah No. 1/PerM/KUMKM/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan pengesahan akta pendirian & perubahan AD koperasi
20. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang pengembangan usaha kecil
21. Peraturan Mendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
22. Peraturan Mendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin usaha
23. Peraturan Mendagri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan PKL
24. Peraturan Menteri perindustrian RI No. 41/N-IND/PER/6/2008 tentang kepentingan & tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan & tanda daftar industri
25. Peraturan Menteri koperasi No. 19/2008 Pedoman SP
26. Peraturan Menteri 21 Tahun 2008
27. Peraturan Menteri 20/Per/ M.KUMKM/XII/2008 tentang pedoman pelaksanaan KUMKM
28. Peraturan Menteri 19/Des/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman pelaksanaan USP adalah koperasi
29. Peraturan Menteri 14/Per/M.KUMKM/XII/2009 tentang penggantian Peraturan Menteri 20/Per/ M KUMKM/XII/2008 tentang pedoman pelaksanaan KUMKM
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 518/35
31. Peraturan Daerah Prov Jateng no 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Kredit
32. Peraturan Daerah Prop Jateng No. 2 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Koperasi
33. Peraturan Daerah Prop Jateng No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan KUMKM
34. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2005 tentang SIUP dan TDP
35. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang pasar Modern
36. Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI 2012/OJK
37. Keputusan Menteri No. 19 Tahun 2000 tentang Pedoman Kelembagaan & Usaha Koperasi

38. Keputusan Menteri No. 351/98 Pelaksanaan SP
39. Instruksi Presiden No. 18/ 1998 tentang Peningkatan, Pembinaan & Pengembangan Perkoperasian
40. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan UMKM
41. Instruksi Gubernur No. 518/23546 tentang OVOP

Pada tingkat Kabupaten/kota antara lain:

1. Peraturan Bupati Brebes No 031 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Brebes no 006 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern
2. Peraturan Bupati no 16A Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Pertanian, Non Pertanian, Koperasi, dan Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah APBD Kab. Brebes
3. Peraturan Daerah Kab. Brebes No. 03 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Koperasi & UKM
4. Perbup Bupati No. 5 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Pembukaan Anggaran Dasar & Pembubaran Koperasi
5. Peraturan Daerah Bupati Kudus No. 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus no 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kab. Kudus
6. Peraturan Daerah Bupati No. 19/2012 tentang UMKM
7. Peraturan Daerah Bupati No. 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Pendekatan dasar modal
8. Peraturan Daerah Kab Kendal no 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan UMKM
9. Peraturan Daerah Kab. Jepara No. 19/2012 tentang UMKM
10. Peraturan Daerah Kab. Semarang No. 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM
12. Peraturan Daerah no 3 Tahun 2008 tentang PKL di Kota Tegal

13. Perwali Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Juklak; Peraturan Daerah no 2 Tahun 2003 tentang PKL

Menurut para pemangku kebijakan, peraturan perundangan-undangan tersebut memberikan pengaruh pada perkembangan KUMKM di Jawa Tengah karena:

1. Dengan adanya peraturan tersebut maka persyaratan pendirian koperasi menjadi mudah.
2. Peraturan perundang-perundangan tersebut bersifat saling menunjang dan melengkapi dan didukung oleh implementasi kebijakan yang tepat. Kerjasama tidak hanya antara koperasi dengan UMKM namun juga antara UMKM dengan bank.
3. Adanya kesadaran bahwa gerakan koperasi dalam kegiatan usahanya dilakukan untuk melayani pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan perkembangan UMKM dapat berjalan baik.
4. Peraturan yang ada mendorong dan melindungi pertumbuhan koperasi & produk kreatif berdasarkan kearifan lokal, mengatur tentang pengembangan iklim yang kondusif melalui pemberian kesempatan berupa dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM
5. Peraturan koperasi yang ada telah mengatur dengan jelas dan lengkap tentang perkoperasian dan pendirian koperasi, hak dan tanggung jawab pengurus, pengawas dan anggota, permodalan koperasi sampai dengan pembubaran koperasi

Hasil kuesioner tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam FGD. Berdasarkan FGD, dari **sisi kebijakan dan kelembagaan** menunjukkan bahwa sisi kebijakan dan kelembagaan untuk pengembangan KUMKM dirasakan juga sudah sangat memadai baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan yang ada baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Gubernur, peraturan daerah dan Peraturan Pemerintah seharusnya dapat menjadi modal yang kuat dalam pengembangan KUMKM.

Peraturan yang dirasakan masih dibutuhkan untuk pengembangan KUMKM adalah peraturan gubernur mengenai perijinan UMKM. Peraturan ini perlu dibedakan dengan peraturan pendirian badan usaha lain, karena UMKM memiliki spesifikasi yang berbeda dengan badan usaha yang lain. Peraturan lain yang dirasakan memberatkan adalah

peraturan perpajakan UMKM. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai perpajakan ini sebaiknya ditinjau kembali agar menjadi lebih adil bagi UMKM. Pajak yang dibebankan ke UMKM sebesar 1% dari omset dirasa sangat memberatkan. Nilai omset bagi UMKM tidak selalu menunjukkan profit ataupun aset, sehingga pembebanan pajak yang demikian besar dirasakan sangat merugikan KUMKM.

Di sisi lain, berdasarkan UU No. 25/1992 setiap koperasi harus ada ijin, namun berdasarkan FGD para pemangku kepentingan merasa belum ada ketegasan dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran. Sinkronisasi kebijakan juga perlu dilakukan, baik antara pemerintah pusat dengan Provinsi, maupun Provinsi dengan kabupaten/kota.

Regulasi yang mengatur hubungan antara koperasi dan UMKM juga belum ada. Para peserta FGD melihat bahwa regulasi ini sangat penting karena koperasi dan UMKM dapat bersinergi. Koperasi dapat membantu permodalan UMKM. Selama ini hubungan antara UMKM dan koperasi telah berjalan namun para peserta FGD menyatakan bila hal ini diatur atau diregulasikan secara khusus maka manfaat yang dirasakan akan semakin besar.

Catatan lain yang diperoleh dalam FGD adalah persyaratan perijinan yang masih rumit. Kebijakan pusat yang cepat dirasakan belum bisa diikuti oleh peraturan daerah. Hal ini yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut bila ingin mengakselerasi perkembangan KUMKM di kabupaten/ kota. Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan UMKM. Permasalahan yang dirasakan dalam pengelolaan koperasi adalah ijin mendirikan cukup lama (yaitu kurang lebih 2 bulan) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, didelegasikan kepada Gubernur, Walikota/Bupati. Akibatnya, Dinkop dan UMKM tidak boleh mengesahkan pendirian koperasi. Hal ini dirasa memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat berjalan efektif.

Hasil diskusi responden melalui kuesioner mengenai efektivitas kelembagaan struktur organisasi di dinas KUMKM dalam pengembangan program-program KUMKM di Jawa Tengah menunjukkan bahwa secara struktur kelembagaan dirasakan relatif ideal dan seharusnya cukup efektif untuk pengembangan semua program, penyiapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.

Permasalahan yang dirasakan oleh responden adalah adanya ketidakseragaman penempatan dinas KUMKM. Untuk dinas yang semata-mata mengurus KUMKM maka pengembangan program akan menjadi sangat efektif. Hal ini berbeda apabila dinas bergabung dengan SKPD lain, misalnya dinas perindustrian dan perdagangan. Penggabungan ini menyebabkan pengembangan KUMKM menjadi kurang efektif.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa secara kelembagaan Dinas KUMKM belum efektif karena:

1. Banyak kegiatan tugas yang berhimpitan antar bidang dan seksi.
2. Ketidakseragaman bentuk lembaga antar daerah. Ada yang berbentuk dinas, sedang yang lain berbentuk bidang atau kantor.
3. Belum adanya jabatan fungsional pendamping pengembangan KUMKM
4. Belum adanya lembaga (BLU) yang menangani dana bergulir bagi pengembangan KUMKM
5. Belum optimalnya peran konsultan dan pendamping pemberdayaan KUMKM

Hal lain yang sama juga mendapat catatan dalam FGD adalah bentuk kelembagaan yang berbeda-beda. Urusan koperasi dan UMKM tidak selalu berdiri tersendiri menjadi DinKUMKM, namun ada yang bergabung dengan dinas lain. Hal ini ditengarai tidak terlalu efektif dalam proses pelaksanaan program karena urusan yang dikerjakan tidak fokus.

Berdasarkan FGD, evaluasi terhadap sisi sumberdaya dalam evaluasi ini dibedakan menjadi dua yaitu sumberdaya pada Dinas dan sumber daya pada pelaku KUMKM.

A. Sumberdaya manusia di tingkat dinas

Sumberdaya manusia yang bekerja di dinas UMKM adalah faktor yang sangat penting dalam pengembangan KUMKM. Salah satu tahap awal yang sangat penting bagi SDM adalah pemahaman atas Tupoksi yang harus mereka lakukan. Berdasarkan kuesioner, pemahaman atas Tupoksi adalah baik, namun terjadi beberapa perbedaan cara pandang atas Tupoksi. Secara umum tupoksi yang dipahami SKPD terkait dengan KUMKM adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan program kegiatan dan kebijakan teknis.
2. Menyelenggarakan penyuluhan bidang Perkoperasian & UMKM.

3. Menyelenggarakan pemberdayaan organisasi dan tata laksana koperasi dan UMKM, pendaftaran koperasi dan konsultasi hukum bidang perkoperasian.
4. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh perencanaan program pemberdayaan, kerjasama, pengaturan kegiatan pengelolaan dan penataan tugas pokok dalam memberdayakan koperasi & usaha mikro kecil dan menengah, administrasi kantor termasuk kegiatan pelayanan umum dan teknis di lingkungan Dinas Koperasi UMKM.
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pemberdayaan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
6. Mengadakan audit koperasi.
7. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi koperasi dalam pengembangan usaha dan pelatihan teknik manajemen.
8. Memberikan layanan konsultasi penyelesaian permasalahan kepada koperasi dan UMKM.
9. Memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, perlindungan dan konsultasi di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan koperasi.
11. Melaksanakan program keterpaduan pemberdayaan koperasi.
12. Melaksanakan program jaringan sistem informasi koperasi.
13. Melaksanakan pembinaan, evaluasi perijinan, bimbingan kelembagaan koperasi, sosialisasi, monitoring pengembangan usaha dan pertumbuhan iklim usaha koperasi, pemberdayaan simpan pinjam dan fasilitasi pembiayaan koperasi.
14. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM dalam penyelenggaraan koperasi.

Responden menyatakan bahwa mereka mampu menjalankan Tupoksi tersebut karena adanya:

1. SDM yang memadai.
2. Sarana dan prasarana kerja.
3. RPJMD yang salah satu misinya fokus pada pengembangan KUMKM.

4. Renstra dinas koperindag yang mendukung pengembangan KUMKM.
5. Peraturan perundang-undangan.
6. Payung hukum SOT dan tupoksi.
7. Koordinasi dengan BUMN.
8. Koordinasi dengan asosiasi KUMKM.
9. Komitmen kepala daerah dalam mengembangkan KUMKM.
10. Kesadaran antara dinas dengan umkm dalam hal pengembangan KUMKM.
11. Kemauan dari KUMKM untuk mengembangkan diri.
12. Jalinan kerjasama dg DEKOPINDA.
13. Jalinan kerja sama dg KPKPRI.
14. Dana pendukung kegiatan.

Sedangkan faktor yang dianggap mendasari dijalankannya Tupoksi adalah:

1. Anggaran yang terbatas.
2. SDM kurang memadai karena seringnya terjadi mutasi sehingga secara kualitas tidak terlalu menguasai hal-hal spesifik yang terkait dengan pengembangan KUMKM.
3. Jumlah SDM yang terbatas untuk melayani dan mendampingi KUMKM yang berkembang dengan sangat pesat.
4. Keterbatasan anggaran, terutama karena pemotongan anggaran akibat kurang berpihaknya terhadap pengembangan KUMKM.
5. Banyaknya tugas diluar Tupoksi.
6. Biaya sewa Stand Pameran yang semakin mahal.
7. Data UMKM belum akurat; kurangnya sosialisasi kebijakan pusat ke daerah.
8. Faktor goegrafi/lokasi KUMKM yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Beberapa hal yang juga menjadi catatan dalam FGD adalah SDM yang melayani pada tingkat dinas dirasakan sangat kurang untuk melayani pertumbuhan KUMKM yang sangat cepat. Sistem mutasi yang terjadi pada setiap SKPD selama ini menyebabkan tuntutan akan pemahaman tugas baru yang lebih cepat. Para pelaku UMKM dan pejabat dinas sendiri menyatakan bahwa mutasi dapat menjadi masalah karena menyebabkan SDM di SKPD yang terkait dengan KUMKM tidak menguasai tugasnya. Keluhan terbesar berasal

dari para pelaku KUMKM yang menyatakan bahwa keterbatasan SDM dinas tidak saja dari segi kuantitas namun juga kualitas/kompetensi. Para pelaku KUMKM ketika mendapat pembinaan merasakan bahwa para pelatih/penyuluh/pembina tidak menguasai bidang KUMKM secara baik. Kurangnya jiwa kewirausahaan pada para pelatih/penyuluh/pembina menyebabkan penyuluhan yang diberikan belum optimal. SDM dinas perlu memahami betul fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan mediator.

Dari sisi dinas, evaluasi yang muncul mengenai sumberdaya di dinas adalah sebagai berikut: *UMKM sebenarnya dibiarkan saja bisa hidup, namun jika tidak dibantu tidak bisa berkembang dan memiliki daya saing. Pemerintah perlu memberikan iklim dan meningkatkan daya saing serta memberikan motivasi. Para pemangku kepentingan menyadari bahwa SDM dinas sendiri seringkali tidak mampu melaksanakan pembinaan. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas SDM yang tidak mencukupi. Untuk itu dibutuhkan lembaga lain (perguruan tinggi) yang dianggap lebih mampu melaksanakan.*

B. Sumberdaya manusia pelaku KUMKM.

Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang banyak dan SDM cukup berpotensi. Kelemahan utama adalah jiwa kewirausahaan yang masih kurang. Banyaknya lulusan sarjana yang tidak terserap di lapangan kerja ternyata tidak memiliki jiwa kewirausahaan menyebabkan pertumbuhan wirausaha di Jawa Tengah dirasakan kurang.

5.2.2. Proses

Dari sisi proses, evaluasi dilakukan dengan melihat sistem perencanaan dan penganggaran program, proses pembinaan, implementasi, sosialisasi, koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, dan monitoring evaluasi. Secara baku, proses yang dilakukan adalah dalam bentuk Renstra, Renja, RKA, PDA, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.

1. Perencanaan dan Penganggaran program

Perencanaan program kerja Dinas Koperasi dan UMKM dimulai dari pemahaman atas RPJMD dan kemudian diturunkan dalam Renstra. Kuesioner yang disampaikan kepada para pemangku kebijakan menanyakan apakah RPJMD Jawa Tengah telah memberi perhatian terhadap pengembangan UMKM. Dari diskusi yang ada maka terdapat kecenderungan jawaban sebagai berikut:

1. RPJMD telah memberikan perhatian pada pengembangan UMKM yang meliputi pendanaan, penyediaan sumberdana, akses penjaminan, penyediaan biaya, kemitraan, perijinan dan perlindungan. RPJMD dipandang cukup berpihak pada pengembangan KUMKM yang tercermin dari program-program urusan koperasi dan UMKM dengan pengalokasian anggaran yang cukup.
2. RPJMD Jawa Tengah juga dipandang telah memberikan gambaran *road map* pengembangan UMKM lima tahun ke depan.
3. RPJMD Jawa Tengah juga dirasakan memberikan perhatian pada kualitas pelayanan, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, perbaikan daya saing produk – terutama melalui pengembangan OVOP.
4. Keberpihakan ini juga mendapat sambutan dari kabupaten/kota dengan bentuk implementasi dalam beberapa program kegiatan pemberdayaan UMKM.
5. Namun di lain pihak keberpihakan RPJMD ini dirasakan belum optimal terutama dalam hal fasilitasi produk unggulan UMKM yang berpotensi ekspor. Keberpihakan ini perlu ditunjang dengan adanya penggalakan dan pemberian kemudan ekspor untuk produk UMKM.
6. Hal lain yang juga muncul dalam diskusi adalah para pemangku kebijakan ini menilai bahwa tidak semua kabupaten/kota memberikan perhatian yang penuh dalam pengembangan KUMKM. Sehingga *road map* yang disediakan dalam RPJMD dirasakan memberikan perhatian dan keberpihakan, terutama dari sisi anggaran.

Seperti diketahui RPJMD Jawa Tengah disusun secara umum. Kemudian langkah berikutnya oleh dinas KUMKM dirinci dengan rancangan per bidang dan program kerja/kegiatan. Aktivitas dan program kerja pada tahun berjalan dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun

pada periode tahun sebelumnya dimana Renja ini merupakan rencana kerja tahunan untuk mendukung Rencana Strategis (Renstra) selama 5 tahun. Hasil diskusi dalam kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/kota telah melihat adanya keterkaitan antara program kerja dengan RPJMD. Hal ini diwujudkan melalui program kerja yang berkesinambungan dan adanya sinergi antara Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sebagian besar dari kegiatan, program pembinaan dan pengembangan KUMKM pemerintah Provinsi sinkron dengan kegiatan kabupaten/kota.

Proses penyusunan Renstra dapat dilakukan secara *top down* dan *bottom up*. Masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan. Berdasarkan hasil diskusi dan kuesioner, sebagian besar responden menyatakan bahwa penyusunan Renstra cenderung bersifat *bottom up* karena disusun berdasarkan Musrenbang dan setiap tahun dilaksanakan Rakor pemberdayaan KUMKM. Penyusunan ini pun diawali dengan adanya rapat koordinasi sinergi program maupun kegiatan dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada tingkat kabupaten/kota, yang diawali dengan pencarian aspirasi melalui Musrebangdes kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Proses *bottom up* ini dipandang jauh lebih baik karena proses penyusunan Renstra dilakukan setelah melihat dan menganalisis kondisi KUMKM terlebih dahulu untuk sebelum dijadikan dasar kebijakan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan

Hasil kuesioner ini dikembangkan dalam diskusi pada FGD. Dari sisi perencanaan hal yang paling menonjol didiskusikan adalah masalah keberpihakan. Perencanaan pada tingkat dinas sudah dilakukan sebaik mungkin, namun pada waktu penetapan anggaran sangat dirasakan kurangnya keberpihakan. Karena itu, ketika sebagian besar anggaran dipotong tanpa disertai dengan alasan yang jelas, maka seluruh program yang sudah didisain sejak awal akhirnya harus menyesuaikan. Hal ini menimbulkan hal ideal yang ditargetkan untuk mengembangkan KUMK menjadi tidak dapat terwujud. Ketika perencanaan sudah menjadi tidak sesuai maka berikutnya proses juga akan berjalan tidak sesuai dengan cita-cita ideal. Hal lain yang sempat dikemukakan dalam FGD dinas, adalah kekurangpahaman atas renstra, sehingga program kerja yang diajukan hanya bersifat hafalan dari tahun ke tahun.

2. Pendampingan

Sebagian besar pelaku KUMKM tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai peraturan-peraturan yang ada, terutama peraturan yang mendukung pengembangan usaha. Peraturan disosialisasikan melalui kunjungan petugas ke lapangan. Namun karena jumlah petugas yang tidak memadai akhirnya banyak KUMKM yang tidak terjangkau. Menurut FGD pelaku usaha, dinas sebaiknya juga menggandeng lembaga yang memberdayakan UMKM atau pun pegawai honorer yang bertugas menjadi pendamping. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan implementasi program.

Pendampingan kerap dipahami oleh UMKM adalah untuk memberikan bantuan. Perlu penyadaran bahwa pendampingan adalah untuk memberikan motivasi. Di sisi lain, pendampingan yang diberikan oleh dinas masih terbatas pada hal-hal yang bersifat motivasi untuk mengembangkan UMKM. Padahal kebutuhan saat ini sudah lebih maju dari hal itu. Secara natural, UMKM dapat tumbuh sendiri karena munculnya jiwa kewirausahaan. Yang dibutuhkan oleh UMKM saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dalam FGD, ketidakmampuan bersaing inilah yang seharusnya menjadi fokus pendampingan. Untuk itu peran dinas untuk melakukan negosiasi dengan pihak luar sangat dibutuhkan. Pendampingan yang dilakukan sebaiknya juga mengarah pada pembukaan pasar baru.

Para pelaku UMKM mengamati bahwa yang dilakukan oleh dinas terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM itu sendiri. Dinas melakukan pendampingan tanpa menanyakan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya dalam pengembangan pasar yang baru.

Hal lain yang menarik dalam pendampingan dikemukakan oleh dinas. Proses pembinaan terbentur karena peserta yang mengikuti sudah tua/berumah tangga sehingga usaha sulit berkembang karena porsi hasil lebih banyak digunakan untuk konsumsi/kebutuhan rumah tangga, porsi untuk ekspansi sangat kecil. Sudah ada pendekatan dengan dinas pendidikan supaya ada muatan lokal tentang UMKM sehingga lulus siap berwirausaha, bukan hanya menjadi pegawai. Sinergi antar Dinas KUMKM dan

Dinas Pendidikan ini tampaknya masih perlu ditingkatkan. Sinergi tidak saja dibutuhkan antara Dinas KUMKM tapi juga perlu dengan SKPD terkait. Hal ini disebabkan di dinas perindustrian dan Perdagangan juga memiliki Tupoksi pembinaan industri kecil menengah. Koordinasi antar kedua dinas ini sangat diperlukan agar pembinaan tidak tumpang tindih.

3. Monitoring dan evaluasi

Dari sisi monitoring dan evaluasi tidak banyak masukan yang diperoleh dari FGD karena peserta FDG memandang bahwa monitoring dan evaluasi adalah hal yang bersifat rutin.

5.2.3. Output

Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa perkembangan KUMKM di Jawa Tengah berjalan dengan baik karena selain dibantu oleh peraturan-peraturan tersebut juga disebabkan oleh kekuatan KUMKM itu sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerjasama yang baik antara koperasi dan UMKM. Mayoritas UMKM kebutuhan modalnya dapat di penuhi dari koperasi. Hal lain yang menunjukkan bahwa KUMKM di Jawa Tengah meningkat yaitu dengan semakin banyaknya kantor cabang KSP.

5.3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan adalah analisis terhadap kepentingan suatu program atau kebijakan dengan kinerja program tersebut. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui seberapa penting suatu kebijakan/program bagi kelompok sasaran dan kinerja dari kebijakan/program tersebut.

Dengan mengadopsi pola pikir dalam analisis kepentingan dan kinerja tersebut, paparan berikut menyajikan evaluasi atas program-program pemberdayaan KUMKM di Jateng. Terdapat empat kemungkinan posisi perbandingan antara tingkat kepentingan dari program tersebut dengan tingkat implementasinya. Keempat kemungkinan itu adalah:

1. Program dianggap penting dan implementasinya baik.
2. Program dianggap tidak penting atau kurang penting tetapi implementasinya baik.
3. Program dianggap penting tetapi implementasinya lemah

4. Program dianggap tidak kurang penting dan implementasinya lemah.

Berikut disajikan tabulasi dari hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM berdasarkan jawaban para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tim Peneliti dalam kuisioner.

Tabel 5.1. Urutan Program Pemberdayaan Menurut Tingkat Kepentingan

	Program diurutkan berdasarkan kepentingan							
	1	2	3	4	5	6	7	8
a. Sistem perencanaan dan penganggaran program	74.60	6.35	6.35	3.17	3.17	4.76	1.59	0.00
b. Proses pembinaan kepada KUMKM	6.56	14.75	11.48	8.20	26.23	6.56	26.23	0.00
c. Proses implementasi program	1.64	21.31	16.39	32.79	8.20	16.39	3.28	0.00
d. Proses sosialisasi program	1.75	33.33	22.81	17.54	5.26	7.02	7.02	5.26
e. Proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program	1.64	4.92	11.48	8.20	18.03	31.15	16.39	8.20
f. Proses koordinasi program	6.56	16.39	21.31	26.23	18.03	6.56	3.28	1.64
g. Proses peningkatan kompetensi SDM	3.28	8.20	11.48	6.56	16.39	22.95	31.15	0.00
h. Proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	0.00	1.64	3.28	1.64	1.64	3.28	13.11	75.41

Seperti disajikan pada Tabel 5.1 sebanyak 74,60 persen responden menempatkan sistem perencanaan dan penganggaran program pada urutan nomor satu berdasarkan tingkat kepentingannya. Kondisi ini mencerminkan sebagian besar responden cenderung berpendapat bahwa sistem perencanaan dan penganggaran program adalah program yang paling penting. Proses sosialisasi dan implementasi program merupakan dua program yang juga dianggap penting. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya responden yang menempatkan kepentingan atas program ini pada urutan dua, tiga dan empat.

Pada urutan berikutnya adalah proses koordinasi program yang diikuti dengan proses pembinaan kepada KUMKM, disusul program terkait proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program dan peningkatan kompetensi SDM. Sementara itu, mayoritas responden (75,41 persen) menempatkan proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pada urutan terakhir menurut tingkat kepentingan.

Masih terkait dengan tingkat kepentingan masing-masing program pemberdayaan KUMKM Provinsi dalam perpektif pemerintah Kabupaten, Tabel 5.2 menyajikan kelompok program yang dianggap penting dan kurang penting. Secara berturut-turut, program yang cenderung dianggap penting adalah sistem perencanaan dan penganggaran program,

proses sosialisasi program dan proses koordinasi program. Sementara itu, program yang cenderung dinilai relatif kurang penting adalah proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian, proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program, proses peningkatan kompetensi program dan proses pembinaan kepada KUMKM.

Tabel 5.2. Tingkat kepentingan masing-masing program pemberdayaan KUMKM Provinsi Jateng dalam perpektif pemerintah Kabupaten

	Penting	kurang penting
a. Sistem perencanaan dan penganggaran program	90.48	9.52
b. Proses pembinaan kepada KUMKM	40.98	59.02
c. Proses implementasi program	72.13	27.87
d. Proses sosialisasi program	75.44	24.56
e. Proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program	26.23	73.77
f. Proses koordinasi program	70.49	29.51
g. Proses peningkatan kompetensi SDM	29.51	70.49
h. Proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	6.56	93.44

Dilihat dari persepsi responden terhadap lemahnya implementasi program, Tabel 5.3 menunjukkan tidak terdapat program yang dinyatakan ekstrim tingkat kelemahannya. Hal tersebut tercermin pada sebaran urutan pendapat responden dalam memberikan urutan program berdasarkan urutan yang paling lemah.

Namun demikian, secara detail dapat dilihat bahwa sebanyak 24,59 persen responden menyatakan bahwa proses koordinasi program merupakan program yang paling lemah, Berikutnya, jumlah responden yang menyatakan bahwa proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian adalah program paling lemah sebanyak 23,33 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga program tersebut memiliki tingkat implementasi yang paling lemah. Jika diperluas pada persepsi kelemahan program, sebanyak 47,54 persen responden menempatkan proses koordinasi progam pada urutan pertama dan kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses koordinasi program cenderung dinilai memiliki tingkat implementasi yang paling lemah.

Tabel 5.3. Persepsi responden terhadap implementasi program Koperasi dan UMKM

	Program diurutkan dari yang paling lemah							
	1	2	3	4	5	6	7	8
a. Sistem perencanaan dan penganggaran program	20.00	16.67	20.00	6.67	5.00	0.00	8.33	23.33
b. Proses pembinaan kepada KUMKM	8.33	10.00	6.67	18.33	15.00	16.67	20.00	5.00
c. Proses implementasi program	6.78	11.86	15.25	13.56	20.34	25.42	6.78	0.00
d. Proses sosialisasi program	5.17	13.79	10.34	18.97	17.24	18.97	15.52	0.00
e. Proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program	6.78	11.86	10.17	18.64	15.25	15.25	11.86	10.17
f. Proses koordinasi program	24.59	22.95	9.84	11.48	9.84	9.84	8.20	3.28
g. Proses peningkatan kompetensi SDM	6.78	13.56	16.95	8.47	15.25	6.78	18.64	13.56
h. Proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	23.33	6.67	11.67	1.67	1.67	5.00	8.33	41.67

Agregasi penilaian responden berdasarkan urutan program yang paling lemah (Tabel 5.4) dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penilaian responden berdasarkan urutan yang paling lemah. Program yang cenderung dinilai paling lemah secara berturut-turut adalah proses koordinasi program, sistem perencanaan dan penganggaran program, dan proses sosialisasi program. Selain itu, juga terkait dengan proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program dan implementasi program, proses peningkatan kompetensi SDM serta pembinaan kepada pelaku KUMKM dan proses pemantauan, palaporan, evaluasi dan pengendalian.

Tabel 5.4. Agregasi penilaian responden berdasarkan urutan program yang paling lemah

Program	Distribusi Responden (%)	
a. Sistem perencanaan dan penganggaran program	63.33	36.67
b. Proses pembinaan kepada KUMKM	43.33	56.67
c. Proses implementasi program	47.46	52.54
d. Proses sosialisasi program	48.28	51.72
e. Proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program	47.46	52.54
f. Proses koordinasi program	68.85	31.15
g. Proses peningkatan kompetensi SDM	45.76	54.24
h. Proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	43.33	56.67

Sementara itu, perbandingan antara tingkat kepentingan dengan program yang dianggap lemah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. Perbandingan antara tingkat kepentingan dengan program yang dianggap lemah

	Penting	Lemah	Keterangan
a. Sistem perencanaan dan penganggaran program	90.48	63.33	sangat penting-kondisi lemah
b. Proses pembinaan kepada KUMKM	40.98	43.33	Relatif kurang penting- kondisi relatif baik
c. Proses implementasi program	72.13	47.46	Penting- kondisi relatif baik
d. Proses sosialisasi program	75.44	48.28	penting- kondisi relatif baik
e. Proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi program	26.23	47.46	Cenderung tidak penting- kondisi relatif baik
f. Proses koordinasi program	70.49	68.85	Sangat Penting- kondisi lemah
g. Proses peningkatan kompetensi SDM	29.51	45.76	Cenderung tidak penting- kondisi relatif baik
h. Proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	6.56	43.33	Tidak penting- kondisi relatif baik

5.4. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Koperasi dan UMKM

5.4.1. Perkembangan kucuran dana ke sektor KUMKM (analisis horisontal)

Kucuran dana ke sektor KUMKM dari berbagai sumber berdasarkan tingkat kemampuan UMKM dapat dikelompokkan dalam 4 kluster, yaitu:

1. Kluster 1: Kelompok Masyarakat yang diberikan bantuan tunai langsung dan Raskin diarahkan untuk membentuk kelompok usaha (Koperasi). Sumber permodalan untuk KUMKM pada kluster 1 ini adalah Bansos Permodalan Koperasi
2. Kluster 2: Usaha yang berjalan prospektif tapi kelayakan akses bank yang masih lemah. Permodalan untuk kluster 2 bersumber dari Dana Bergulir LPDB (Lembaga Penjaminan Dana Bergulir), PKBI, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*)
3. Kluster 3: Usaha yang *feasible* tetapi belum mampu mendapatkan pembiayaan perbankan. Sumber permodalannya bersumber bank namun melalui skema KUR (Kredit Usaha Rakyat)
4. Kluster 4: Usaha yang *feasible* dan *bankable*, sumber pendanaan dari perbankan.

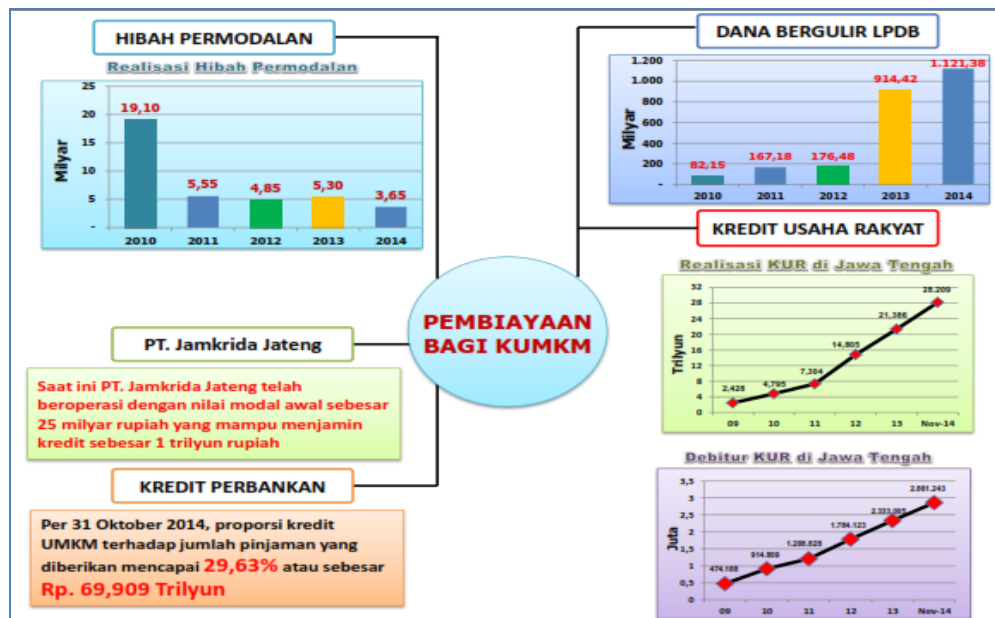
Gambar 5.1 Kluster Sumber Permodalan Koperasi dan UMKM



Analisis atas penyediaan sumber-sumber pendanaan untuk UMKM menunjukkan beberapa hal positif berikut ini:

- 1) Secara umum terjadi kenaikan jumlah permodalan dari semua sumber dari tahun ke tahun (2010-2014). Kecuali hibah permodalan yang menurun pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013.

Gambar 5.2. Kluster Sumber Permodalan Koperasi dan UMKM



Pertumbuhan pada 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, untuk pendanaan KUR terjadi kenaikan sebesar 36%, LPDB sebesar 23%, dan Kredit Perbankan sebesar 14% (tabel 5.6). Posisi sampai dengan bulan November 2013 telah disalurkan KUR sebanyak Rp. 20.792.312.000.000,- kepada 2.286.827 debitur UMKM dan tahun 2014 sampai dengan November 2014 disalurkan KUR sebanyak Rp. 28.201.489.000.000,- kepada 2.861.243 debitur UMKM. Penyerapan dana bergulir di Jateng yang bersumber dari LPDB per Oktober 2014 mencapai Rp. 1.121.384.653.925,-. Sedangkan tahun 2014 kepada 472 mitra LPDB dengan nilai sebesar Rp. 679,425 milyar, sementara dari kredit perbankan hingga Oktober 2013, telah disalurkan Kredit bagi UMKM di Jateng sebesar Rp. 61,396 trilyun (data Bank Indonesia) dan pada 2014 sampai dengan Oktober 2014, telah disalurkan kredit bagi UMKM di Jateng sebesar Rp. 69,909 trilyun (data Bank Indonesia).

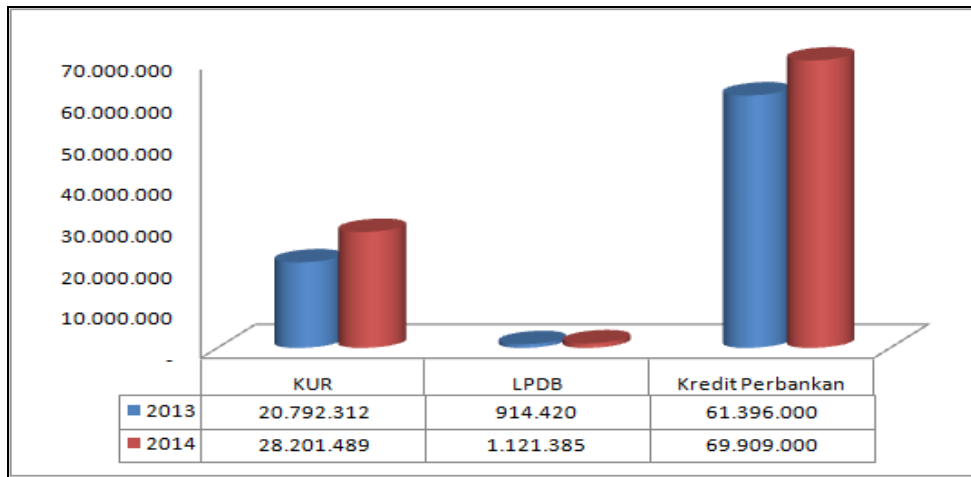
Tabel 5.6. Tabel Pertumbuhan Jenis Pendanaan KUR, LPDB, dan Kredit Perbankan
(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pendanaan	2013	2014	Pertumbuhan
KUR	20.792.312	28.201.489	36%
LPDB	914.420	1.121.385	23%
Kredit Perbankan	61.396.000	69.909.000	14%

Sumber: Nota Dinas Gubernur Jawa Tengah (2014 dan 2013)

- 2) Perbandingan besaran pendanaan KUR, LPDB, dan kredit perbankan tahun 2013 dan 2014, memperlihatkan proporsi pendanaan terbanyak bersumber dari kredit perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan saat ini merupakan penyedia dana terbesar bagi UMKM. Sumber pendanaan lain yang perlu diperhitungkan adalah perusahaan melalui program-program CSR (*Corporate Social Resposibilities*) masing-masing perusahaan. Namun data yang komprehensif mengenai besarnya dana CSR yang digulirkan ke sektor KUMKM belum tersedia. Sebenarnya adanya kewajiban CSR perusahaan besar merupakan potensi besar sumber pendanaan bagi sektor KUMKM. Dinas KUMKM diharapkan dapat menjadi mediator antara kedua pihak yang berkepentingan, yaitu KUMKM yang membutuhkan sumber pendanaan dan pihak perusahaan dengan program CSR-nya.

Gambar 5.3. Grafik Pertumbuhan Sumber Pendanaan KUMKM

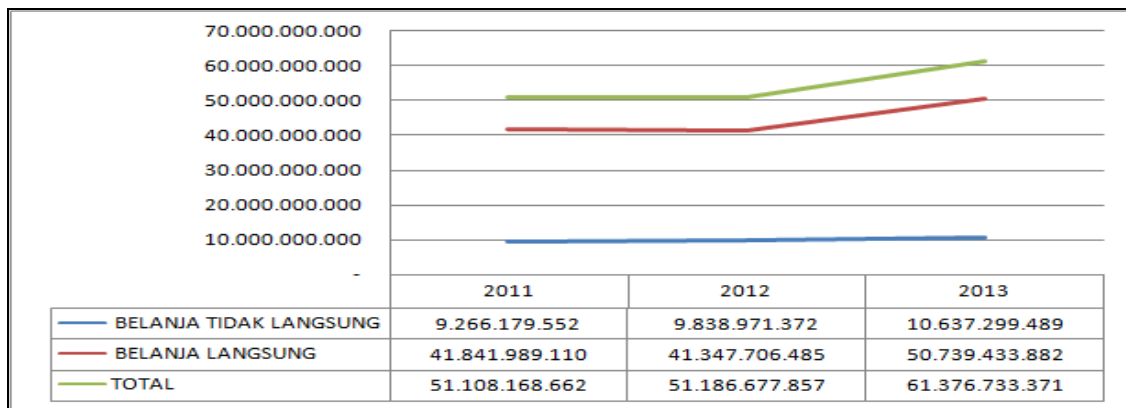


Sumber: Nota Dinas Gubernur Jawa Tengah (2014 dan 2013)

5.4.2 Perkembangan Anggaran Koperasi dan UMKM terhadap APBD

Kecukupan anggaran diperlukan untuk terlaksananya program-program yang dibutuhkan dan direncanakan untuk pengembangan sektor Koperasi dan UMKM (KUMKM). Dilihat dari total anggaran belanja Dinas KUMKM Jawa Tengah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun (2011 sampai dengan 2013). Dari total anggaran belanja sebesar Rp. 51,10 milyar di tahun 2011, menjadi Rp. 51,18 milyar di tahun 2012 dan menjadi Rp. 61,3 milyar di tahun 2013. Peningkatan total belanja tahun 2011 relatif kecil yaitu sebesar 0,2%. Sedangkan peningkatan total belanja Dinas KUMKM tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 cukup signifikan yaitu 19,9%.

Gambar 5.4 Grafik Perkembangan Anggaran (Realisasi) Koperasi dan UMKM



Peningkatan jumlah anggaran belanja akan meningkatkan produktivitas jika dialokasikan pada program-program yang memberdayakan. Oleh sebab itu, analisis selanjutnya dilakukan untuk mengevaluasi pertumbuhan anggaran per kelompok program (kelompok mata anggaran). Tabel 5.7 memperlihatkan prosentase pertumbuhan anggaran per kelompok program.

Tabel 5.7 Pertumbuhan Anggaran Koperasi dan UMKM Per Kelompok Program/Kelompok Mata Anggaran

KELOMPOK KEGIATAN/MATA ANGGARAN	2011	2012	2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.266.179.552	9.838.971.372	10.637.299.489
		6,2%	8,1%
BELANJA LANGSUNG			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.099.851.273	4.402.668.130	6.121.183.310
		42,0%	39,0%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	2.895.223.427	3.802.403.795	5.015.013.608
		31,3%	31,9%
Program peningkatan disiplin aparatur	93.181.000	118.806.000	99.522.000
		27,5%	-16,2%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	122.995.000	53.900.000	86.400.000
		-56,2%	60,3%
Program pendidikan non formal dan informal	3.234.136.245	3.284.842.120	4.267.719.741
		1,6%	29,9%
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	465.162.680	827.384.200	767.409.000
		77,9%	-7,2%
Program penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM	4.603.569.450	3.215.455.900	2.853.302.779
		-30,2%	-11,3%
Program pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing	12.098.762.780	7.312.025.550	11.363.408.719
		-39,6%	55,4%
Program pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan usaha	2.464.906.250	4.274.577.250	2.746.297.569
		73,4%	-35,8%
Program peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha	10.780.586.355	13.164.265.890	11.484.009.248
		22,1%	-12,8%
Program peningkatan kualitas SDM UMKM	1.983.614.650	891.377.650	1.978.847.908
		-55,1%	122,0%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah	-	-	3.956.320.000
Total Belanja Tidak Langsung	41.841.989.110	41.347.706.485	50.739.433.882
		-1,2%	22,7%
TOTAL	51.108.168.662	51.186.677.857	61.376.733.371
		0,2%	19,9%

Kelompok program yang mengalami peningkatan terus menerus di tahun 2012 dan 2013, berturut-turut dari prosentase peningkatan terbesar, adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran: mengalami kenaikan 42% di tahun 2012, dan 39% di tahun 2013.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur: mengalami kenaikan 31,3% tahun 2012 dan 31,9% tahun 2013.

3. Program pendidikan formal dan informal: naik 1,6% di tahun 2012, dan naik sebesar 29,9% pada tahun 2013. .

Kelompok program yang mengalami penurunan terus menerus di tahun 2012 dan 2013, adalah:

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan KUMKM: turun 30,2% di tahun 2012 dan turun 11,3% di tahun 2013.

Kelompok program yang mengalami peningkatan di tahun 2012 lalu menurun di tahun 2013, adalah:

1. Program peningkatan disiplin aparatur: naik 27,5% tahun 2012, namun turun 16,2% tahun 2013.
2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak: naik 77,9% di tahun 2012 namun turun 7,2% di tahun 2013.
3. Program pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan: naik 73,4% di tahun 2012, lalu menurun 35,8% di tahun 2013.
4. Program pengembangan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha: naik 22,1 % di tahun 2012 dan turun 12,8 di tahun 2013.

Kelompok program yang mengalami penurunan di tahun 2012 namun meningkat di tahun 2013, adalah:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: meskipun turun 56,2% di tahun 2012 namun mengalami peningkatan signifikan di tahun 2013 sebesar 60,3%.
2. Program pengembangan diversifikasi usaha dan daya saing: turun 39,6% di tahun 2012 dan mengalami kenaikan 55,4% di tahun 2013.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya KUMKM: turun 55,1% di tahun 2012, dan naik 122% di tahun 2013.

Program baru di tahun 2014 adalah program peningkatan sarana dan prasarana apatur pemerintahan daerah, dengan total anggaran relatif besar yaitu 3,9 milyar.

6.4.1. Perkembangan Alokasi Anggaran Koperasi dan UMKM per kelompok anggaran (analisis vertikal)

Proporsi anggaran masing-masing kelompok program terhadap total anggaran, memperlihatkan bagaimana strategi dan prioritas organisasi, dalam hal ini adalah dinas

KUMKM. Baik di tahun 2011, 2012, maupun 2013 prioritas anggaran adalah pada dua program utama, yaitu program pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing KUMKM dan program peningkatan produktivitas dan pemasaran KUMKM.

Prioritas program ketiga untuk tahun 2011 adalah penguatan kapasitas kelembagaan KUMKM, sedangkan tahun 2012 dan 2013 adalah program pelayanan administrasi perkantoran. Prioritas keempat tahun 2011 adalah pelayanan administrasi perkantoran, sementara tahun 2012 dan 2013 adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sementara itu program yang terkait dengan peningkatan SDM, terdiri dari:

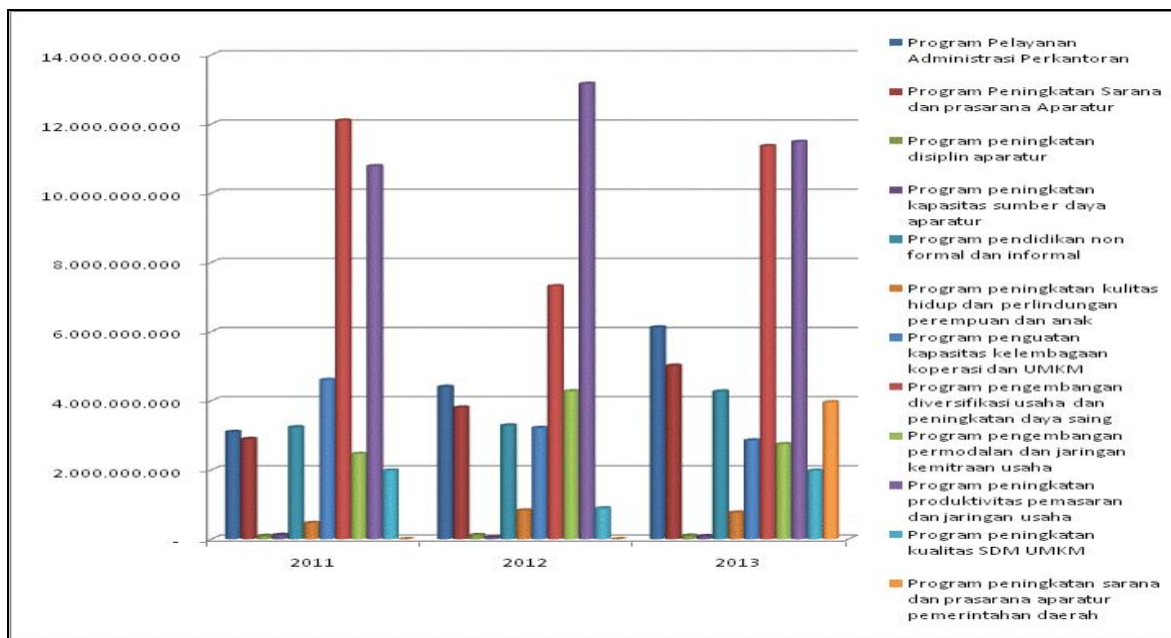
1) Program peningkatan kualitas SDM UMKM:

- Program pendidikan formal dan informal: tahun 2011 prioritas ke-empat, tahun 2012 menjadi prioritas ke-enam, dan di tahun 2013 menjadi prioritas ke-lima.
- Program peningkatan kualitas SDM KUMKM: tahun 2011 dan 2012 menjadi prioritas ke-delapan dan di tahun 2013 menjadi prioritas ke-sembilan.

2) Program peningkatan kualitas SDM Dinas KUMKM

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: baik di tahun 2011, 2012 maupun 2013 terus menerus menempati prioritas terendah dari total anggaran belanja Dinas KUMKM.

Gambar 5.5. Grafik Perkembangan Anggaran (Realisasi) per Kelompok Program/Kelompok Mata Anggaran



6.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran

Secara umum, jika dinilai dari perbandingan anggaran dan realisasainya, tampak telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran belanja. Tahun 2011 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.161.898.338,- dari anggaran yang disediakan. Tahun 2013 Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.272.052.515,- dari anggaran yang disediakan. Tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.884.320.118,- dari anggaran yang disediakan.

Namun demikian, efisiensi anggaran sebenarnya terjadi jika seluruh kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan biaya yang lebih rendah daripada dianggarkan atau jika target-target kinerja tercapai dengan biaya yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Maka sebelum membuat kesimpulan bahwa telah terjadi efisiensi, harus dilihat terlebih dahulu capaian pelaksanaan kegiatan atau capaian target kinerjanya. Jika tahun 2011 capaian sasaran adalah sebesar 284,29%, tahun 2012 capaian sasaran 127,45% dan tahun 2013 adalah sebesar 109,8%, maka dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi efisiensi anggaran belanja Dinas KUMKM baik di tahun 2011, 2012, maupun 2013.

Dari analisis-analisis keuangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan hal-hal positif yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan permodalan untuk UMKM dari tahun ke tahun (2011 – 2013) dan besarnya porsi sumber pendanaan dari kredit perbankan.
2. Efektivitas anggaran yang tampak dari pemberian prioritas anggaran pada program pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing KUMKM dan program peningkatan produktivitas dan pemasaran KUMKM, yang terjadi selama tahun 2011 hingga 2013.
3. Pengelolaan anggaran yang telah dilakukan dengan baik sehingga efisiensi anggaran dapat dijaga setiap tahunnya dari tahun 2011 hingga tahun 2013.

Sementara itu kondisi yang masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan adalah:

1. Kecukupan anggaran

Proporsi anggaran Dinas KUMKM Jawa Tengah terhadap APBD Jawa Tengah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2011 sebesar 0,8%, mengalami penurunan menjadi 0,6% di tahun 2012 dan kembali turun menjadi 0,5% di tahun 2013. Kondisi ini memperlihatkan konsistensi dengan hasil FGD di mana muncul persoalan mengenai keberpihakan dalam penentuan anggaran.

Tabel 5.8. Proporsi Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Jateng terhadap APBD Jawa Tengah

	2011	2012	2013
Anggaran Belanja Dinas KUMKM	0,051	0,051	0,061
APBD Jawa Tengah	6,062	8,104	12,099
	0,8%	0,6%	0,5%

Hasil pengisian kuesioner juga mendapatkan jawaban cukup atas kecukupan anggaran sebanyak 9 responden, sementara sisanya sebanyak 34 responden menjawab belum cukup. Alasan responden menilai bahwa anggaran yang ditetapkan belum mencukupi dengan argumen:

- Tidak sebanding dengan jumlah KUMKM yang sangat banyak, sehingga dengan anggaran tersedia baru sedikit KUMKM yang mendapatkan fasilitas.
 - Banyak program kegiatan yang belum dapat terakomodasi
 - Sarana-prasarana dan pemberdayaan UMKM kurang
2. Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM aparatur menempati prioritas terendah. Kondisi ini konsisten dengan hasil FGD yang mengemukakan kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM Dinas KUMKM dan pendapat yang dikemukakan dalam kuesioner bahwa rendahnya kemampuan SDM Dinas KUMKM dalam melaksanakan tupoksinya disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
 3. Tingginya prioritas serta kecenderungan peningkatan anggaran untuk program pelayanan administratif perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk mengevaluasi apakah anggaran yang tersedia CUKUP atau TIDAK/KURANG CUKUP memenuhi kebutuhan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/kota, berikut disajikan ringkasan jawaban responden. Pertama, sebanyak 11 responden dari 43

responden yang memberi jawaban bahwa anggaran yang tersedia CUKUP untuk memenuhi kebutuhan Dinas dan kebutuhan pemberdayaan KUMKM. Kedua, sebanyak 32 responden memberi jawaban anggaran yang tersedia TIDAK/KURANG CUKUP untuk memenuhi kebutuhan Dinas dan pemberdayaan KUMKM. Mereka memberi alasan bahwa anggaran yang ada tidak sebanding dengan jumlah KUMKM yang sangat banyak yang harus dibina, luas wilayah yang harus dibina, banyaknya program pemberdayaan KUMKM yang harus mendapat perhatian, dan banyaknya permintaan masyarakat.

5.5. Analisis SWOT Koperasi dan UMKM

Seperti telah dijelaskan dalam Bab III, analisis *Strength* (S), *Weakness* (W), *Opportunity* (O) and *Threat* (T) atau disingkat SWOT dalam kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akan diguna untuk melakukan penyesuaian tujuan dan program-program pemberdayaan KUMKM. Dengan pendekatan SWOT akan diketahui kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Berikut diuraikan analisis SWOT dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM dan juga dengan para pelaku Koperasi dan UMKM.

5.3.1. Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan hasil FGD dengan para kepala Dinas Koperasi dan UMKM dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan juga kuisioner yang diberikan kepada mereka, diperoleh jawaban yang beragam tentang SWOT dari masing-masing dinas. Tabel 5.9 berikut ini menyajikan tabulasi hasil analisis SWOT Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.9. Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah dan legislatif 2. Adanya UU, Perda Provinsi, Perda Kota tentang KUMKM 3. Komitmen untuk tegakkan birokrasi 4. Jumlah SDM pembina KUMKM cukup banyak 5. Jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan KUMKM cukup memadai 6. Perbup 17 Tahun 2008 tentang Tupoksi serta uraian tugas jabatan perangkat daerah 7. Tersedianya anggaran & SDM dan sarana dan prasarana 8. Pegawai Dinas KUMKM papa bidang teknis merupakan pembina KUMKM sesuai Tupoksinya yang dibagi per wilayah kecamatan 9. Komitmen & kebijakan terkait pemberdayaan KUMKM 10. Struktur organisasi memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas aparatur tidak memadai sebagai fasilitator kegiatan 2. Belum adanya SOP Pengembangan UMKM & evaluasi 3. Sarana dan prasarana masih kurang 4. Political will kurang 5. Wilayah yang sangat luas 6. Koordinasi yang lemah 7. Penguasaan Tupoksi lemah 8. Tingkat kedisiplinan rendah 9. SDM secara kualitas & kuantitas terbatas 10. Anggaran untuk pengembangan KUMKM masih terbatas 11. Pendapatan / gaji yang timpang antara pegawai provinsi dengan pegawai daerah 12. Proporsi anggaran masih lebih banyak untuk kepentingan belanja rutin 13. Beberapa program & kegiatan belum dilaksanakan tapi sudah diganti 14. Juklak-juknis belum memadai 15. Sinkronisasi program dengan kabupaten/kota lemah 16. Jumlah pembina KUMKM yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program yang sinergi antara pemerintah daerah, provinsi & pusat 2. Terserapnya jumlah tenaga kerja 3. Terbukanya MEA 2015 4. Program & pembinaan dari Provinsi 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah disertai perimbangan keuangan yang adil 6. Hubungan baik dengan Pem Prop, Pusat & Kab/Kota 7. Potensi penumbuhan Gerakan Koperasi dan UMKM di masyarakat cukup baik 8. Kondisi sosio geografis Provinsi Jawa Tengah cukup baik untuk pengembangan usaha, khususnya lahan yang tersedia masih cukup 9. Menambah tenaga PPKL 10. Adanya dukungan kabupaten/kota dalam pemberdayaan koperasi & UMKM 11. Dipercaya Dinas sebagai Pembina terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan 12. Regulasi yang semakin berpihak pada UMKM 13. Koperasi yang berkembang 14. Dinas KUMKM merupakan dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya MEA 2015 dan pasar bebas 2. Produk impor banyak harga lebih murah 3. SDM sering mutasi 4. Lemahnya kerjasama 5. Persepsi yang berbeda atas regulasi 6. Program pusat dan daerah tidak sama 7. Perubahan sistem/program dalam penyusunan anggaran & pelaporan dari pemkot yang langsung diterapkan mempersulit penyelesaian pekerjaan 8. Kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak segera diikuti dengan Juklak-Juknis 9. Jumlah koperasi tingkat provinsi yang semakin meningkat tidak seimbang dengan jumlah pegawai 10. Peraturan yang sudah tidak relevan dengankondisi sekarang 11. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penentuan standart pelayanan 12. Jangkauan pembinaan menyebar

tersendiri yang tidak terintegrasi dengan SKPP lain	
15. Tersedia anggaran yang cukup untuk pembinaan KUMKM	
16. Adanya dukungan dari provinsi maupun pusat seperti adanya fasilitasi, pelatihan, workshop, pameran dan magang	
17. Koordinasi yang sudah berjalan dengan baik, baik ke pusat, tingkat provinsi, & kabupaten/kota	
18. Pengembangan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan	

Berdasarkan Tabel 5.9 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah secara internal memiliki beberapa Kekuatan secara internal (11 item) sedangkan dilihat dari Kelemahan ada 17 item yang dinilai menjadi kelemahan Dinas Koperasi dan UMKM. Secara eksternal, bila dilihat dari Peluang, ada 18 item peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas. Sementara kalau dilihat dari Ancaman, ada 12 item ancaman yang patut dicermati dan diwaspadai Dinas.

5.5.2. Analisis SWOT Pelaku Koperasi dan UMKM

Dalam paparan berikut ini, analisis SWOT akan diterapkan kepada KUMKM sebagai penerima target program pemberdayaan KUMKM. Hasil analisis SWOT pada KUMKM selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi penyusunan program-program pemberdayaan KUMKM Provinsi Jawa Tengah.

Lingkungan Internal. Lingkungan internal UMKM meliputi kondisi aspek-aspek mananajerial KUMKM, yakni produksi; sumber daya manusia; keuangan dan pemasaran. Kondisi UMKM pada aspek produksi meliputi antara lain kapasitas produksi, kualitas dan ketersediaan bahan baku, kualitas hasil produksi, dan penggunaan teknologi. Pada aspek kapasitas (terutama unit usaha yang berskala mikro dan kecil cenderung memiliki kapaitas produksi yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan UMKM kurang mampu atau tidak dapat berproduksi pada skala ekonomis (*economies of scale*) yang selanjutnya memiliki daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Terkait dengan bahan baku, terdapat beberapa jenis hasil produksi UMKM yang tidak mengalami kesulitan baik

dalam kualitas maupun kuantitas bahan baku, terdapat UMKM yang tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku tetapi kualitas bahan baku tidak standar. Terdapat pula UMKM yang menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku, baik secara kuantitas maupun kualitas. Mengenai kualitas hasil produksi, responden UMKM pada umumnya menyatakan atau menyadari bahwa mutu produk mereka memiliki kualitas yang kurang bagus. Pada sisi pemanfaatan teknologi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi oleh UMKM cenderung masih rendah. Kondisi UMKM pada sisi sumberdaya manusia (SDM)-nya menurut hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa SDM UMKM cenderung memiliki kualitas yang rendah dan memiliki etos kerja yang rendah. Mengenai kondisi keuangannya, UMKM Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya UMKM terhadap akses sumber pembiayaan, keterbatasan modal. Terkait dengan kondisi pemasarannya, kondisi persaingan yang semakin ketat harus dihadapi oleh KUMKM. Namun demikian, KUMKM memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan (perkembangan) pasar dan sementara ini ketahanan yang tinggi karena cenderung berorientasi pada pasar domestik.

Lingkungan Eksternal. Lingkungan eksternal UMKM meliputi antara lain kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan, perkembangan teknologi, serta kondisi sosial budaya. Secara bersama-sama, kondisi eksternal tersebut ada yang bersifat menghambat perkembangan usaha UMKM (*threat/ancaman*), ada pula yang bersifat mendukung (*opportunity/peluang*). Terkait dengan faktor eksternal tersebut, beberapa UMKM tetap optimis dengan kondisi pasar, artinya masih menilai bahwa pasar yang semakin terbuka memberikan peluang untuk berkembang. Pertumbuhan penduduk, kondisi ekonomi, stabilitas ekonomi, dukungan pemerintah (kebijakan pemerintah untuk menggunakan produk para UMKM, promosi dari pihak dinas apabila ada tamu bisa di perlihatkan produk unggulan, pelatihan-pelatihan, pendampingan, bantuan alat, fasilitasi promosi dan keamanan serta minat masyarakat terhadap produk UMKM juga semakin meningkat. Namun demikian, tingkat persaingan yang semakin tinggi dengan berlakunya pasar bebas dikategorikan sebagai ancaman. Faktor eksternal yang juga dirasakan menghambat antara lain harga bahan baku yang relatif tinggi, masih adanya kebijakan-kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada UMKM, serta legalitas usaha sangat sulit syaratnya.

Tabel 5.10. Hasil Analisis SWOT Pelaku Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Loyalitas/ketekunan pelaku UMKM dalam Pengembangan produk dan bisnisnya • Fleksibilitas dalam mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. • Daya tahan yang tinggi, terutama dari guncangan eksternal karena cenderung berorientasi pada pasar domestik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM • Akses pasar • Akses modal dan keterbatasan modal • Kualitas hasil produksi • Profesionalisme pelaku UMKM • Aspek organisasi.manajemen UMKM • Keterbatasan pengetahuan tentang dunia bisnis, penguasaan teknologi • Mengandalkan keluarga/kerabat sebagai pekerja tidak dibayar
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan bahan baku • Ketersediaan Tenaga kerja • Pasar bagus/terbuka • Pertumbuhan Penduduk • Pertumbuhan Ekonomi • Stabilitas ekonomi & keamanan • Minat masyarakat terhadap produk UMKM meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan yang semakin tinggi/pasar bebas • Harga bahan baku • Masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada UMKM • Keterbukaan masyarakat terhadap aktivitas usaha • Legalitas usaha sangat sulit syaratnya

Sumber: Data primer, diolah.

Lingkungan internal koperasi sedikit berbeda dengan lingkungan internal UMKM. Hal tersebut disebabkan karena koperasi memiliki azas yang tidak boleh dilanggar, yaitu kekeluargaan. Oleh karena lingkungan internal koperasi nampak dijiwai oleh azas tersebut. Pengelompokan lingkungan internal koperasi ke dalam kelompok faktor yang mendukung (*strength*/kekuatan) dan faktor yang dinggap menghambat (*weakness*/kelamahan) adalah seperti yang disajikan pada matriks SWOT berikut (lihat Tabel 5.11). Sementara itu, lingkungan eksternal koperasi tidak jauh berbeda dengan lingkungan internal UMKM.

Tabel 5.11. Pengelompokan lingkungan internal koperasi ke dalam kelompok faktor yang mendukung dan faktor yang dinggap menghambat

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Semangat Kekeluargaan/gotong royong anggota • Solidaritas pengurus • Modal • Akuntabilitas • Kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban • Loyalitas anggota dan pengurus • Permodalan (KSP) • Kepercayaan anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang pembinaan dan pengawasan • Akses informasi secara umum • Etos kerja • Teknologi • Kualitas sumberdaya manusia • Profesionalisme pengurus
Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi • Pasar terbuka • Komitmen pemerintah/dukungan pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi • Stabilitas ekonomi & keamanan • Kebutuhan masyarakat akan modal (KSP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian masyarakat "koperasi itu rentenir" (Untuk KSP) • Gencarnya usaha kredit mikro bagi perbankan (untuk KSP) • Memudarnya semangat berkoperasi

Sumber: Data primer, diolah

BAB VI

DISKUSI DAN KESIMPULAN

6.1. Diskusi Hasil

Analisis efektivitas kinerja dan sinkronisasi perencanaan dan program-program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di Jateng; (2) mengevaluasi dampak pemberdayaan KUMKM Jateng terhadap produktivitas KUMKM, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan KUMKM; (3) menganalisis permasalahan internal dan eksternal di KUMKM; (4) evaluasi sinkronisasi program pemberdayaan KUMKM tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan (5) mengusulkan optimalisasi program pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan penting yang patut didiskusikan lebih lanjut.

Pertama, dari hasil analisis dan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah, diperoleh hasil bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas serta komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Visi, misi, tujuan, sasaran dan komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tatakelola koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya arahan yang jelas dan komitmen yang kuat tersebut maka dinas-dinas pemerintahan provinsi yang terkait, terutama Dinas Koperasi dan UMKM, dan pemerintahan kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap kinerja (efisiensi, efektivitas dan relevansi) dari program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah direalisasikan. Evaluasi dan upaya

perbaikan terhadap tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi tampaknya terus dilakukan Pemerintah Provinsi untuk memastikan adanya sinkronisasi antara strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan realisasi hasilnya.

Kedua, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJPD dan RPJMD dan komitmen yang kuat dari pemerintahan provinsi terhadap pembangunan koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah meresponnya dengan menyusun Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yang memberikan arahan strategis tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan Indikator Kinerja dalam pengelolaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Renstra-SKPD tersebut juga mengatur tatakelola organisasi Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain menyusun Renstra-SKPD, Dinas Koperasi dan UMKM juga menyusun Rencana Kerja Tahunan dan LAKIP untuk mempertanggungjawabkan kinerja Dinas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak terkait.

Hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM selama tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) dengan baik dan hasilnya sangat efektif. Dari LAKIP 2010-2014, terlihat kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam merealisasikan lima (5) sasaran utama sebagaimana diamanatkan dalam Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Tahun 2008-2013 sangat efektif karena melampaui target kuantitatif yang telah ditetapkan. Kelima sasaran tersebut adalah (1) meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kemandirian KUMKM; (2) meningkatnya proporsi usaha kecil formal; (3) meningkatnya potensi produk koperasi dan UMKM yang berorientasi ekspor; (4) bertumbuhnya wirausaha baru dan kesempatan kerja; dan (5) meningkatnya kualitas SDM dan kuliatas kelembagaan KUMKM.

Ketiga, dari hasil analisis relevansi dan signifikansi program-program pemberdayaan KUMKM yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Provinsi Jawa Tengah maupun instansi terkait, diperoleh hasil bahwa peningkatan kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah berdampak

luas terhadap pertumbuhan KUMKM baik dari sisi jumlah KUMKM dan jumlah pelakunya, jumlah aset dan omzetnya dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan kinerja tersebut juga telah berdampak luas pada penyerapan kredit untuk modal kerja dan investasi dari perbankan, menurunkan risiko finansial dan bisnis KUMKM serta telah memperkuat struktur perekonomian dan kinerja perekonomian Jawa Tengah selama tahun 2010-2014. Berbagai sumber mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan KUMKM dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak-dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Keempat, hasil analisis empiris menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan, baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan KUMKM, sudah sangat banyak dan memadai. Hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kinerja KUMKM Jawa Tengah. Berdasarkan hasil FGD, sisi kebijakan dan kelembagaan untuk pengembangan KUMKM dirasakan sudah sangat memadai baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan yang ada, baik dalam bentuk UU, Pergub, Perda dan PP, dinilai dapat menjadi modal yang kuat dalam pengembangan KUMKM di Jawa Tengah.

Namun demikian, peserta FGD juga mengajukan banyak keluhan. Mereka menyatakan bahwa peraturan yang dirasakan masih dibutuhkan untuk pengembangan KUMKM adalah Pergub mengenai perijinan UMKM. Peraturan ini perlu dibedakan dengan peraturan pendirian badan usaha lain karena UMKM memiliki spesifikasi yang berbeda dengan badan usaha yang lain. Peraturan lain yang dirasakan memberatkan adalah peraturan perpajakan UMKM. PP No.46/2014 mengenai perpajakan ini sebaiknya ditinjau kembali agar menjadi lebih adil bagi UMKM. Pajak yang dibebankan ke UMKM sebesar 1% dari omzet dirasa sangat memberatkan. Nilai omzet bagi UMKM tidak selalu menunjukkan *profit* ataupun aset, sehingga pembebanan pajak yang demikian besar dirasakan sangat merugikan KUMKM.

Selain itu, regulasi yang mengatur hubungan antara koperasi dan UMKM juga belum ada. Para peserta FGD melihat bahwa regulasi ini penting, karena koperasi dan UMKM dapat bersinergi. Koperasi dapat membantu permodalan UMKM. Selama ini hubungan

antara UMKM dan koperasi telah berjalan namun para peserta FGD menyatakan bila hal ini diatur atau diregulasikan secara khusus maka manfaat yang dirasakan akan semakin besar.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam upaya pengembangan KUMKM adalah persyaratan perijinan yang masih rumit. Mayoritas peserta FGD menyatakan kebijakan pusat yang cepat dirasakan belum bisa diikuti oleh Perda. Hal ini yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut bila ingin mengakselerasi perkembangan KUMKM di kabupaten/kota. Selain itu, mesti dipahami bahwa koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan UMKM. Permasalahan yang dirasakan dalam pengelolaan koperasi adalah izin mendirikan cukup lama harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, didelegasikan kepada Gubernur, Walikota/Bupati sehingga dengan demikian Dinas KUMKM tidak boleh mengesahkan pendirian koperasi. Hal ini dirasa memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat berjalan efektif.

Hasil diskusi melalui kuesioner mengenai efektivitas kelembagaan struktur organisasi di dinas KUMKM dalam pengembangan program-program KUMKM di Jawa Tengah menunjukkan bahwa secara struktur kelembagaan dirasakan relatif ideal dan seharusnya cukup efektif untuk pengembangan semua program, penyiapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi penguatan modal bagi koperasi dan UMKM. Permasalahan yang dirasakan oleh responden adalah adanya ketidakseragaman penempatan dinas KUMKM. Untuk dinas yang semata-mata mengurus KUMKM, pengembangan program akan menjadi sangat efektif. Hal ini berbeda apabila dinas bergabung dengan SKPD lain, misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penggabungan ini menyebabkan pengembangan KUMKM menjadi kurang efektif.

Selain sejumlah permasalahan di atas, masih terdapat sejumlah permasalahan KUMKM yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Berdasarkan hasil analisis SWOT dari hasil kusioner, diperoleh hasil bahwa ada sejumlah faktor internal dan eksternal KUMKM yang yang cenderung mendukung dan menghambat perkembangan KUMKM di kabupaten/kota. Faktor pendukung kekuatan KUMKM antara lain (1) loyalitas/ketekunan pelaku KUMKM dalam pengembangan produk dan bisnisnya; (2) fleksibilitas dalam mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar; dan (3) daya tahan UMKM yang tinggi, terutama dari goncangan eksternal karena cenderung

berorientasi pada pasar domestik. Sedangkan faktor yang dinilai kurang mendukung kemajuan KUMKM adalah kualitas SDM, akses pasar, akses modal dan keterbatasan modal, kualitas hasil produksi, profesionalisme pelaku UMKM, aspek organisasi dan manajemen KUMKM, keterbatasan pengetahuan tentang dunia bisnis dan penguasaan teknologi, dan mengandalkan keluarga/kerabat sebagai pekerja tidak dibayar.

Sementara itu, aspek-aspek yang dinilai memberikan peluang bagi kemajuan KUMKM adalah ketersediaan bahan baku yang berlimpah, ketersediaan tenaga kerja, pasar yang bagus/terbuka, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan, dan minat masyarakat terhadap produk UMKM yang terus meningkat. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang patut diwaspadai dan disiasati adalah persaingan yang semakin tinggi dan adanya pasar bebas MEA, harga bahan baku yang tinggi, masih ada kebijakan-bebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada UMKM, dan legalitas persyaratan usaha sangat sulit.

Kelima, dari hasil evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan realisasinya diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (disingkat Dinas). Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari: 1) pada tahun 2011, Dinas menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.161.898.338,- dari anggaran yang disediakan; 2) pada tahun 2013, Dinas menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.272.052.515,- dari anggaran yang disediakan; dan 3) pada tahun 2014, Dinas menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.884.320.118,- dari anggaran yang disediakan. Sementara efektivitas penggunaan anggaran tercermin dari tercapainya seluruh kegiatan yang direncanakan dengan biaya yang lebih rendah daripada dianggarkan dan tercapainya target-target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Dari hasil analisis, terlihat bahwa pada tahun 2011 capaian sasaran adalah sebesar 284,29%, tahun 2012 capaian sasaran adalah 127,45% dan tahun 2013 adalah sebesar 109,8%. Berdasarkan capaian-capaian itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal efisiensi penggunaan anggaran APBD untuk program-program pemberdayaan KUMKM dan efektivitas hasil-hasil

yang tercapai selama 2010-2014, Dinas Koperasi dan UMKM telah menggunakan anggaran APBD secara efisien dan mencapai hasil yang sangat efektif.

6.2. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan dampak pemberdayaan KUMKM terhadap produktivitas KUMKM, kesejahteraan masyarakat KUMKM, dan pertumbuhan KUMKM di Jawa Tengah. Penelitian ini juga mengevaluasi sinkronisasi antara program pemberdayaan KUMKM pada tingkat Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah dengan program pemberdayaan KUMKM pada tingkat kabupaten/kota serta menganalisis permasalahan internal dan eksternal KUMKM Jawa Tengah guna optimalisasi program pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun-tahun selanjut. Berdasarkan hasil telaah dan evaluasi yang mendalam terhadap data sekunder dan data primer yang diperoleh, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010-2014 telah mencapai hasil-hasil yang efisien dan sangat efektif. Hampir semua program kerja yang telah direncanakan dilaksanakan secara baik dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang amat baik karena melampaui target-target kinerja yang telah ditetapkan. Karena itu, dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM selama tahun 2010-2014, kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai SANGAT BAIK (A+).

Kedua, selain mencapai hasil yang efisien dan sangat efektif, pelaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010-2014 juga telah memberikan dampak positif yang luas terhadap produktivitas dan pertumbuhan KUMKM, serta kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat pelaku KUMKM. Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data statistik ekonomi selama 2010-2014 terlihat bahwa jumlah KUMKM dan produktivitasnya dalam aset, omzet dan ekuitas atau modal serta produksi/jasa yang dihasilkannya terus

meningkat. Di sisi lain, risiko finansialnya (risiko kredit) terus menurun. Peningkatan kinerja ekonomi tersebut berdampak positif pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan bahan baku, serta peningkatan kesejahteraan para pelaku KUMKM. Data BPS tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah penduduk miskin dan menganggur serta keparahan dan kedalaman kemiskinan, meningkat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi informal, dan meningkat pendapatan per kapita masyarakat. Pertumbuhan kinerja sektor KUMKM dinilai telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap tren tersebut.

Ketiga, meskipun mencapai hasil yang efisien dan efektif serta memberikan dampak positif yang luas bagi pertumbuhan dan produktivitas KUMKM serta kesejahteraan bagi para pelaku KUMKM, namun ternyata ada sejumlah permasalahan internal dan eksternal yang perlu segera dicermati dan ditanggapi secara arif, bijaksana, cermat dan cerdas serta ditindaklanjuti oleh pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah maupun pihak-pihak terkait.

Dari persepsi para pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, masih terdapat banyak permasalahan atau kelemahan internal Dinas yang perlu mendapat perhatian ke depan. Permasalahan tersebut adalah kualitas aparatur yang tidak memadai sebagai fasilitator kegiatan, belum adanya SOP pengembangan dan evaluasi KUMKM, sarana dan prasarana yang masih kurang, dana Dinas yang terbatas sementara wilayah pelayanan sangat luas, dan koordinasi yang lemah. Selain itu, juga lemah atau terbatas dalam hal penguasaan Tupoksi, tingkat kedisiplinan aparatur, kompetensi SDM, anggaran untuk pengembangan KUMKM, dan terjadi ketimpangan pendapatan / gaji antara pegawai provinsi dengan pegawai daerah. Proporsi anggaran dijuga dinilai masih lebih banyak digunakan untuk kepentingan belanja rutin, bukan pada pemberdayaan UMKM. Hal lain yang juga dinilai lemah adalah begitu cepatnya terjadi perubahan program & kegiatan, juklak-juknis yang belum memadai, lemahnya sinkronisasi program dengan kabupaten/kota, dan jumlah pembina KUMKM yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas.

Secara eksternal, Dinas Koperasi dan UMKM baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota juga dinilai belum optimal menjalankan fungsinya dalam

mendorong pertumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan KUMKM. Dinas juga dinilai belum optimal mempersiapkan para pelaku UMKM menghadapi era pasar bebas MEA dan lainnya karena dililit sejumlah permasalahan internal yang telah disebutkan di atas. Menurut para pimpinan instansi terkait, meski telah terjalin koordinasi antar dinas dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program-program pengembangan dan pemberdayaan UMKM, namun siapa “dirigen” atau *team leader*-nya yang memimpin tidak jelas sehingga menyebabkan masing-masing pihak seperti berjalan sendiri-sendiri meski tujuannya sama. Hal itu tidak baik, dan pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya yang menjadi dirigennya. Sementara para pelaku UMKM mengeluhkan bahwa masih terdapat kebijakan pemerintah dan perbankan yang tidak berpihak kepada UMKM. Pendampingan dan kompetensi para pendamping dari Dinas juga dinilai masih lemah. Selain itu, legalitas mendapatkan usaha juga sangat sulit syaratnya.

Keempat, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program pengembangan, pendampingan dan pemberdayaan KUMKM pada tingkat Dinas Koperasi dan UMKM provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota belum berjalan secara optimal. Ada sejumlah hal yang dinilai masih lemah dan perlu dibenahi. Dalam hal sinkronisasi program, meski menurut Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dinyatakan telah ada arahan yang jelas dan komitmen yang kuat bagi dinas-dinas baik untuk tingkat Provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota, namun hasil telaah empiris menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang dianggap penting namun di tingkat Kabupaten/Kota justru dianggap lemah. Program yang dimaksud adalah program sistem perencanaan dan penganggaran program, serta proses koordinasi program. Sebaliknya, terdapat program yang dinilai kurang penting tetapi ternyata dinilai sangat penting dan memiliki kondisi yang sangat baik. Program tersebut adalah program proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian. Secara keseluruhan, sinkronisasi dan sinergisitas program antara provinsi dengan kabupaten/kota, antara tingkat kepentingan program dengan daya dukung SDM dan sarana prasarana penunjang implementasi program dinilai masih lemah dan perlu ditingkatkan ke depan.

BAB VII

TANTANGAN DAN STRATEGI MEMAJUKAN KOPERASI DAN UMKM JAWA TENGAH

Meskipun dari sisi efisiensi dan efektivitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah membukukan kinerja yang bagus dalam pelaksanaan program-program pendampingan dan pemberdayaan KUMKM selama 2010-2014, namun dari hasil telaah empiris terhadap sinkronisasi program dan permasalahan internal-eksternal Koperasi dan UMKM (KUMKM) ternyata terdapat sejumlah ketidaksinkronan dan sejumlah permasalahan yang perlu dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan KUMKM Jawa Tengah pada 2016 dan tahun-tahun selanjutnya.

Sejumlah permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi tantangan serius dan mendesak yang perlu segera dirumuskan solusi operasional dan strategisnya serta ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Hal tersebut penting agar amanat dalam RPJMD Jawa Tengah 2014-2018 dan keinginan Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong kemajuan pembangunan KUMKM sebagai pilar utama dan lokomotif pendorong bagi kemajuan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan jumlah penduduk miskin dan penyerap tenaga kerja di tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya dapat terwujud.

7.1. Tantangan Operasional dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja dan permasalahan internal-eksternal yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, paling sedikit ada 10 isu operasional dalam pembangunan KUMKM yang perlu mendapat perhatian khusus dari Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi maupun Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas program kerja pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya. Isu-isu tersebut adalah:

1. Masih lemahnya sinkronisasi, daya dukung dan efektivitas program kerja antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
2. Lemahnya kompetensi atau kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur Dinas Koperasi dan UMKM dalam berperan sebagai pendamping atau fasilitator koperasi dan UMKM.
3. Masih kurangnya bantuan fasilitasi usaha, pendampingan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM.
4. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan dinas-dinas terkait tentang arah, fokus, sasaran, target dan upaya pendampingan dan pemberdayaan KUMKM sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya, kesimpangsiuran dalam pendataan jumlah KUMKM yang berhasil didampingi, ketidakefektifan pendampingan serta ketidakpastian seberapa besar kemajuan dan kontribusi sosial dan ekonomi dari pembangunan KUMKM di Jawa Tengah.
5. Lemahnya keberpihakan pemerintah dalam kebijakan/regulasi pemerintah untuk mendukung kemajuan pembangunan koperasi dan UMKM serta mendukung akses permodalan dengan bunga yang rendah terhadap KUMKM.
6. Masih rendahnya jiwa wirausaha pada generasi muda, khususnya lulusan perguruan tinggi yang belum terserap dalam dunia kerja, dalam penciptaan UMKM; sementara kemampuan dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menumbuhkembangkan jiwa, semangat dan kemampuan kewirausahaan generasi muda masih sangat terbatas.
7. Belum memadainya program-program bantuan, pendampingan dan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam mempersiapkan para pelaku UMKM menghadapi era persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), AFTA dan lainnya.
8. Masih sangat sedikitnya jumlah koperasi dan UMKM di Jawa Tengah yang dapat didampingi dan diberdayakan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah, padahal jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Jawa Tengah sangat banyak.
9. Masih sangat terbatasnya kerjasama dan kemitraan strategis antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan instansi-instansi terkait

dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.

10. Belum terintegrasinya koperasi dan UMKM sebagai suatu entitas korporasi yang saling bersinergi untuk saling membantu dan membesarkan usaha maupun memakmurkan para pelakunya.

Berdasarkan sejumlah isu atau permasalahan operasional dan taktikal tersebut di atas maka strategi dan rekomendasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergisitas visi, misi, tujuan, sasaran, target, strategis dan kebijakan, program kerja dan aktivitas pembangunan KUMKM antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota. Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah perlu membentuk suatu tim atau unit khusus yang berperan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memastikan terlaksananya sinkronisasi tersebut.
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur Dinas Koperasi dan UMKM yang berperan sebagai pendamping atau fasilitator koperasi dan UMKM. Caranya adalah Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi dan kabupaten/kota perlu bekerja sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengembangan KUMKM secara berkesinambungan atau mengirim SDM Dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen KUMKM yang diselenggarakan pihak-pihak yang kredibel dan kompeten.
3. Meningkatkan penyediaan fasilitasi usaha, pendampingan dan pemberdayaan UMKM dengan cara memberi bantuan permodalan usaha, sarana-prasarana usaha, mendidik dan melatih para pelaku koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional mereka. Dinas Koperasi dan UMKM juga perlu mendampingi secara berkelanjutan terhadap para pelaku koperasi dan UMKM yang produktif atau potensial dalam pengembangan usaha mereka.
4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan dinas-dinas terkait berkenaan dengan arah, fokus, sasaran, target dan upaya pendampingan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya. Caranya adalah dengan menjadikan Dinas Koperasi dan UMKM

sebagai “pemimpin” atau dirigen dalam pembangunan koperasi dan UMKM pada level Propinsi maupun kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan merumuskan arah pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan dinas-dinas dan instansi terkait. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah sebaiknya perlu membahas penambahan peran strategis dan taktis sebagai “dirigen” ini dengan Gubernur dan dinas-dinas terkait.

5. Mengevaluasi kembali regulasi-regulasi atau kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota yang kurang berpihak dan mendukung kemajuan pembangunan KUMKM, dan selanjutnya meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk merevisi atau membuat regulasi-regulasi atau kebijakan baru yang berpihak pada koperasi dan UMKM. Salah satu kebijakan yang perlu dievaluasi adalah kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam mendapatkan akses permodalan perbankan dengan bunga kredit yang rendah. Dinas Koperasi dan UMKM dapat meminta kepada Gubernur Jawa Tengah agar skim Kredit Usaha Program (KUP) yang saat sedang diujicobakan di Kabupaten Kudus dapat juga diperluas untuk diakses oleh para pelaku UMKM di Jawa Tengah yang memenuhi kualifikasi. Seperti diketahui, KUP yang dilaksanakan Bank Jateng diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) yang produktif dengan bunga yang sangat rendah dan tanpa jaminan, serta didampingi para pendamping yang terlatih dan kompeten.
6. Menciptakan program-program kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan kemampuan manajerial kepada generasi muda dalam mengelola UMKM. Dinas dapat melakukan kemitraan strategis dan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan desa dan keagamaan dalam upaya pendidikan, pelatihan dan pengembangan kemajuan kewirausahaan UMKM kepada generasi muda, khususnya lulusan SMP, SMA dan perguruan tinggi yang ingin mengembangkan UMKM. Dinas dapat merumuskan program bantuan permodalan usaha kepada generasi muda yang ingin memulai dan mengembangkan usahanya.
7. Menciptakan program-program bantuan berupa pelatihan ketrampilan usaha dan kemampuan manajerial, pendampingan dan pemberdayaan usaha, serta membuka

akses-akses pasar kepada para pelaku UMKM agar mereka lebih siap menghadapi era persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), AFTA dan lainnya.

8. Memperluas pendampingan dan pemberdayaan terhadap UMKM-UMKM yang selama ini belum mendapat perhatian khusus dari Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi. Caranya adalah dengan memunculkan program database pendataan terhadap seluruh UMKM di Jawa Tengah. Untuk kepentingan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dapat melakukan bekerja sama dengan BPS Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota, dan pihak-pihak terkait untuk pendataan. Dengan adanya database tersebut maka Dinas Koperasi dan UMKM akan dengan mudah mengidentifikasi UMKM yang belum dan patut didampingi, merumuskan program-program pendampingan dan pemberdayaan secara lebih luas dan komprehensif, serta menyediakan data UMKM yang diperlukan pemerintah dan instansi-intansi terkait dalam upaya memacu pembangunan UMKM di Jawa Tengah. Penyediaan database koperasi dan UMKM secara terpadu dan komprehensif pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi juga akan meminimalisir kesimpangsiuran data UMKM dan mengefektifkan perencanaan pembangunan daerah terhadap koperasi dan UMKM pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
9. Menjalini kerjasama dan kemitraan strategis antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan instansi-instansi terkait dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Dengan perguruan tinggi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dapat mendorong pimpinan perguruan tinggi agar memfokuskan Tridharma ketiga, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat” untuk penciptaan, pendampingan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Program-program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Usaha (KKU) mahasiswa perlu didorong dan diarahkan untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM. Demikian pula pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen juga bisa diminta untuk difokuskan pada pendampingan dan pemberdayaan KUMKM. Untuk mewujudkan hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pimpinan perguruan tinggi. Kepala Dinas juga dapat menggandeng perusahaan-perusahaan untuk melakukan kemitraan strategis pendampingan dan pemberdayaan KUMKM melalui pendekatan “CSR Bersama

Pengembangan UMKM” dengan perguruan tinggi, masyarakat pelaku UMKM dan pihak-pihak terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah perlu meminta kepada Gubernur Jawa Tengah agar melakukan perjanjian dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan para kepala bupati/walikota dan pimpinan perguruan tinggi sehingga bisa menjadi payung hukum bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan PKS dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait.

10. Mendorong para pelaku UMKM untuk membentuk Koperasi UMKM sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk saling bersinergi dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk, saling membantu dalam menghadapi kesulitan permodalan usaha, dan saling membesarkan UMKM-nya masing-masing. Wadah Koperasi UMKM dapat berperan sebagai wadah simpan-pinjam dana, pengembangan manajemen dan penguatan usaha, memberikan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM), memperkuat dan memperluas jejaring pemasaran, dan lainnya. Dengan adanya wadah ini maka pemerintah dan pihak-pihak terkait akan dengan mudah melakukan koordinasi dan kerjasama untuk pengembangan, penguatan, pendampingan dan pemberdayaan usaha bagi UMKM-UMKM di Jawa Tengah.

Untuk bisa mewujudkan strategi dan rekomendasi kebijakan tersebut di atas maka penyusunan program-program kerja dan kegiatan yang relevan, fokus dan efektif pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Demikian pula peningkatan anggaran program kerja dan kegiatan untuk mendukung terlaksananya rekomendasi kebijakan tersebut menjadi mendesak untuk dilakukan.

Selain itu, penyesuaian kembali terhadap program-program kegiatan pengembangan UMKM yang telah dirumuskan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2016 juga perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun 2016, sejumlah strategi dan rekomendasi kebijakan yang telah dipaparkan di atas sebaiknya juga diakomodir sehingga permasalahan internal dan eksternal Dinas Koperasi dan UMKM serta harapan-harapan dari para pelaku Koperasi dan UMKM serta pihak-pihak pemangku kepentingan terkait dapat mulai terjawab dan teratasi.

7.2. Tantangan Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil analisis terhadap permasalahan internal-eksternal dan tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah selama 2010-2014 ditemukan adalah sejumlah isu atau permasalahan strategis yang saling terkait yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera dari Gubernur Jawa Tengah dan SKPD-SKPD terkait dalam upaya memajukan pembangunan KUMKM dan meningkatkan peran serta kontribusi dari sektor ini ke depan. Sejumlah isu atau permasalahan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM yang mampu dapat didampingi dan diberdayakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah masih sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 100.000 UMKM (2014), sementara jumlah UMKM di Jawa Tengah diperkirakan mencapai di atas 1,2 juta unit usaha. Selain itu, program-program bantuan, pendampingan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi dan Kabupaten/Kota dinilai juga masih sangat minim dan kurang memberikan stimulus yang berarti bagi peningkatan kinerja UMKM yang didampingi. Masih sangat terbatasnya jumlah UMKM yang dapat didampingi dan minimnya peran serta kontribusi pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan kinerja UMKM tersebut disebabkan oleh minimnya anggaran dana yang dialokasikan dari APBD untuk pembangunan koperasi dan UMKM. Hal tersebut menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM serta dinas-dinas terkait tidak leluasa dalam memperluas jumlah pendampingan UMKM dan menciptakan program-program pendampingan dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan yang dapat secara efektif meningkatkan kinerja UMKM. Keterbatasan anggaran tersebut pula yang menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi tidak dapat berperan lebih besar dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan para pelaku koperasi dan UMKM di seluruh Jawa Tengah dan memampukan mereka dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha serta pemasaran.
2. Dalam upaya mendorong peran, kontribusi dan kemajuan UMKM dalam pembangunan Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Koperasi dan UMKM tapi juga memberikan kewenangan

kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut dinilai telah menyebabkan terjadinya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, satu unit UMKM bisa didampingi oleh sejumlah Dinas baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Data tentang jumlah UMKM yang didampingi yang dilaporkan Dinas Koperasi dan UMKM serta dinas-dinas terkait bisa simpang siur dan tidak tepat. Masing-masing Dinas juga tidak bisa mengklaim berapa besar dampak positif/negatif dan efektivitas dari program-program pendampingan dan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan Dinas terhadap kemajuan dan kontribusi dari UMKM terhadap pembangunan daerah. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah kurang adanya koordinasi dan sinergisitas antardinas karena masing-masing dinas merasa memiliki kewenangan dan otoritasnya sendiri dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

3. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2014-2018 dan kemudian dipertajam dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2015 dan 2016, sektor UMKM ditempatkan sebagai sektor usaha prioritas unggulan yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dibangun dan dikembangkan. Tujuannya adalah agar sektor UMKM dapat berperan lebih besar dalam upaya mengatasi isu-isu strategis pembangunan daerah yaitu pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, pengurangan kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat, dan peningkatan kualitas perekonomian daerah. Namun komitmen politik tersebut ternyata tidak diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dari APBD untuk memperluas dan mempercepat pembangunan UMKM. Dari Kebijakan Anggaran Pembangunan Koperasi dan UMKM Jawa Tengah periode 2010-2015, terlihat bahwa kebijakan anggaran pembangunan UMKM Jateng yang pada 2013 meningkat menjadi Rp 63,9 miliar, tapi kemudian menurun menjadi Rp 61,38 miliar (2014) dan Rp54,53 miliar (2015). Penurunan drastis tersebut juga tercermin dari penurunan yang signifikan proporsi anggaran Koperasi dan UMKM terhadap APBD yang menurun dari 0,64% (2013) menjadi 0,38% (2014) dan 0,31% (2015). Pada tahun 2016, alokasi anggaran dan proporsinya untuk pembangunan KUMKM diperkirakan juga akan semakin menurun. Penurunan anggaran tersebut dinilai menjadi faktor penyebab utama

lambannya pertumbuhan kinerja KUMKM dan belum maksimalnya peran dan kontribusi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan dan melaksanakan program-program kegiatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagaimana dikeluhkan para pelaku KUMKM dan para *stakeholder* terkait.

Berdasarkan paparan di atas, maka ada tiga rekomendasi kebijakan strategis yang perlu dilakukan Gubernur dan Dinas-dinas terkait pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya dalam upaya semakin memajukan koperasi dan UMKM Jawa Tengah.

Pertama, meningkatkan jumlah alokasi anggaran secara signifikan dari APBD Jawa Tengah untuk pembangunan (penciptaan, pengembangan, pendampingan dan pemberdayaan) koperasi dan UMKM. Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran tersebut maka Dinas Koperasi dan UMKM akan memiliki keleluasaan untuk memperluas jumlah koperasi dan UMKM yang didampingi, menciptakan program-program pendampingan dan pemberdayaan yang lebih tepat guna dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM, mengembangkan program-program pelatihan dan pengembangan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas manajerial para pelaku koperasi dan UMKM serta mendorong generasi muda berperan aktif dalam pengembangan UMKM. Peningkatan anggaran tersebut juga akan memungkinkan Dinas Koperasi dan UMKM menindaklanjuti 10 rekomendasi operasional atau taktikal seperti yang telah diusulkan di atas.

Kedua, untuk memperkuat kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar dinas dan instansi-instansi terkait dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan KUMKM, Gubernur Jawa Tengah sebaiknya perlu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang menugaskan dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk berperan aktif sebagai pemimpin dalam pembangunan KUMKM. Kewenangan dari Dinas Koperasi dan UMKM adalah mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensinergiskan program-program pendampingan dan pemberdayaan KUMKM yang ada pada setiap dinas dan instansi secara terpadu dalam kerangka kepentingan provinsi.

Ketiga, dalam upaya membantu para pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang rendah dan tanpa jaminan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan usaha, Gubernur Jawa Tengah sebaiknya menerbitkan Peraturan

Gubernur yang meminta kepada para bupati/walikota untuk mengadopsi dan mengaplikasikan Program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang saat ini sedang diujicobakan di Kabupaten Kudus di kabupaten/kotanya masing-masing. Bank Jateng dan PT Jamkrida Jawa Tengah juga diminta untuk mendukung ekstensifikasi pelaksanaan KUP tersebut.

Seperti diketahui, skim KUP difokuskan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Selain membebaskan dari jaminan kredit dan memberikan kredit dengan bunga yang rendah, para pelaku UMK juga akan didampingi para pendamping terlatih dalam pengembangan usaha. Selain ramah UMK. Tatakelola KUP juga tampaknya dapat efektif merangsang dan memotivasi para pelaku UMK untuk meningkatkan produktivitas dan omzet usahanya. Karena ada *risk sharing* dan juga pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap UMK maka sangat mungkin risiko kredit macet KUP juga akan sangat rendah. Singkatnya, skim KUP layak diterapkan di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah untuk membantu para pelaku UMK dalam memajukan usahanya (Lako, 2015).

Namun demikian, diusulkan agar skim KUP tidak hanya terfokus pada pelaku UMK tapi juga diperluas untuk para pelaku usaha menengah (UM). Jumlah skim pendanaan yang diberikan kepada UM juga mesti lebih besar, misalnya berkisar antara Rp 40 juta hingga Rp 50 juta dengan jangka waktu peminjaman 36 bulan. Selama ini para pelaku UM juga sering mengeluhkan bahwa usaha mereka tidak mengalami kemajuan berarti karena mengalami kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari perbankan akibat bunga yang tinggi dan jaminan yang besar. Dengan memperluas sasaran KUP tersebut maka keberadaan KUP di Jawa Tengah diharapkan akan berkontribusi besar bagi pertumbuhan sektor UMKM dan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, serta meningkatkan kinerja perekonomian daerah.

Referensi

- Aziz, K.A danNorhasim, M. 2008, *Cluster-based Policy Making: Assessing Performance and Sustaining Competitiveness Review of Policy Research*, vol. 25.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2009. *Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2008-2013*". Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2014. *Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018*". Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Dampak (impact) Industri Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014*. Paper disajikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Semarang 13 Januari 2015.
- Haraguchi, N. 2008. *The One-Village-One-Product (OVOP) movement: What it is, how it has been replicated, and recommendations for a UNIDO OVOP-type project*. UNIDO, Vienna.
- Hoetoro , A. dkk. 2013. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Pendekatan Clustering yang Dinamis dan Integratif (Kaji Tindak Pada Klaster-Klaster Industri Kecil di JawaTimur)*. Tahun kesatu PUPT. Universitas Brawijaya.
- Kurokawa, K., Tembo, F. and teVelde ,D. W. 2010. *Challenges for the OVOP Movement in Sub-Saharan Africa -Insights from Malawi, Japan and Thailand*. Overseas Development Institute, 111 Westminster Bridge Road London E1 7JD UK.
- Lako, Andreas. 2015. KUP Berkah bagi UKM. *Suara Merdeka*. 18 April 2015
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.